



TAHUN 2018 LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH PENGADILAN TINGGI DKI JAKARTA

CAPAIAN KINERJA



KATA PENGANTAR

Pertama-tama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT karena berkat rahmat dan hidayahnya maka Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tahun 2018 dapat diselesaikan dengan baik dan lancar.

Penyusunan Laporan Kinerja Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tahun 2018 mengacu pada Rencana Strategis Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tahun 2015-2019 yang telah dilakukan reviu menindaklanjuti Surat Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 192/KMA/SK/XI/2016 tanggal 9 Nopember 2016 tentang Penetapan Reviu Indikator Kinerja Utama Mahkamah Agung Republik Indonesia dan perlu disinkronisasi dengan Reviu Renstra Mahkamah Agung 2015-2019 serta surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 933/SEK/OT.01.3/10/2017 tentang Reviu Indikator Kinerja Utama (IKU) Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama.

Laporan Kinerja Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tahun 2018 ini merupakan laporan yang menggambarkan pencapaian kinerja Pengadilan Tinggi DKI Jakarta berdasarkan capaian kinerja yang telah dilakukan atas perbandingan antara realisasi kinerja dengan target yang telah ditetapkan dalam rencana strategis.

Dalam Laporan Kinerja Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tahun 2018 ini diuraikan mengenai pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU), pengukuran kinerja, analisis akuntabilitas kinerja, dan analisis akuntabilitas keuangan selama tahun 2018.

Penyusunan Laporan Kinerja Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tahun 2018 diharapkan mampu menjadi alat ukur dan laporan kinerja kepada para pemangku kepentingan (*stakeholders*) terkait kinerja Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada tahun 2018. Dalam penyusunan Laporan Kinerja Pengadilan Tinggi DKI Jakarta ini belum sempurna, sehingga diharapkan masukan yang positif dan konstruktif guna kesempurnaan penyusunan laporan ini.

Jakarta, 26 Februari 2019

Ketua,



Dr. H. MUH. DAMING SUNUSI, S.H., M.Hum.

NIP. 19520601 197802 1 001

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GRAFIK	V
DAFTAR FOTO	V
RINGKASAN EKSEKUTIF	1
BAB I PENDAHULUAN	5
A. Latar Belakang.....	5
B. Kedudukan, Wewenang dan Fungsi	5
BAB II PERENCANAAN KINERJA PENGADILAN TINGGI DKI JAKARTA...	9
A. Rencana Strategis Tahun 2015 – 2019.....	9
B. Perjanjian Kinerja Tahun 2018.....	14
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2018	17
A. Capaian Kinerja Tahun 2018.....	17
B. Realisasi Anggaran.....	50
BAB IV PENUTUP	65
A. Kesimpulan.....	65

LAMPIRAN :

- Perjanjian Kinerja (PK) Satker
- Rencana Kinerja Tahunan (RKT) yang dilaporkan dan rencana kinerja tahun berikutnya
- Reviu Matrik Rencana Strategis Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Tahun 2015-2019
- Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tentang Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Tahun 2018.
- Pemantauan Perkara Per Triwulan Tahun 2018

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1. Perjanjian Kinerja Tahun 2018 (Setelah di revisi).....	14
Tabel 2. Perjanjian Kinerja Tahun 2018 (Sebelum di revisi).....	15
Tabel 3. Hasil Pengukuran Kinerja.....	18
Tabel 4. Sasaran 1: Terwujudnya Proses Peradilan Yang Pasti, Transparan dan Akuntabel.....	21
Tabel 5. Sasaran 1 Indikator 1.....	22
Tabel 6. Penyelesaian perkara perdata, pidana, dan tipikor tahun 2018...	22
Tabel 7. Sasaran 1 Indikator 2.....	25
Tabel 8. Penyelesaian Perkara Perdata, Pidana, dan Tipikor	25
Tabel 9. Perbandingan Perkara Perdata.....	27
Tabel 10. Perbandingan Perkara Pidana	27
Tabel 11. Perbandingan Perkara Tipikor.....	27
Tabel 12. Sasaran 1 Indikator 3.....	30
Tabel 13. Sisa Perkara Tahun 2016 s/d 2018 Perkara Perdata	30
Tabel 14. Sisa Perkara Tahun 2016 s/d 2018 Perkara Pidana.....	31
Tabel 15. Sisa Perkara Tahun 2016 s/d 2018 Perkara Tipikor.....	31
Tabel 16. Sasaran 1 Indikator 4.....	33
Tabel 17. Perbandingan persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi.....	36
Tabel 18. Sasaran 1 Indikator 5.....	37
Tabel 19. Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta.....	37
Tabel 20. Sasaran 2, Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara.....	40
Tabel 21. Sasaran 2 Indikator 2.....	43
Tabel 22. Sasaran 3 Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti.....	44
Tabel 23. Penanganan Pengaduan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Tahun 2018	45
Tabel 24. Sasaran 4, Persentase peningkatan produktifitas kinerja sumber daya manusia (SKP dan Penilaian Prestasi Kerja)	46
Tabel 25. Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Tahun 2018.....	47
Tabel 26. Realisasi Anggaran Per Program tahun 2018	48
Tabel 27. Rincian Penyerapan Belanja Non Operasional Perkantoran Tahun Anggaran 2018	48
Tabel 28. Rincian Penyerapan Belanja Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran Tahun Anggaran 2018	49
Tabel 30. Rincian Penyerapan Belanja Peningkatan Sarana dan Prasarana	51

	Tahun Anggaran 2018	
Tabel 31.	Rekapitulasi Realisasi Anggaran DIPA : 005.01.2.097467 Badan Urusan Administrasi :	50
Tabel 32.	Perbandingan Realisasi Anggaran DIPA 005.01.2.097467 Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung Tahun Anggaran 2016- 2018	51
Tabel 33.	Penyerapan Anggaran Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum DIPA 005.03.2.099062 Tahun Anggaran 2018	52
Tabel 34.	Perbandingan Realisasi Anggaran DIPA 005.03.2.099062 Badan Peradilan Umum Tahun Anggaran 2016-2018	52
Tabel 35.	Realisasi Anggaran Pengadilan Tinggi Dki Jakarta Th.2018 Yang Telah Digunakan Untuk Mendukung Pencapaian Sasaran Yang Telah Ditetapkan Dalam Rencana Strategis Anggaran Dipa 01	54
Tabel 36.	Realisasi Anggaran Pengadilan Tinggi Dki Jakarta Th.2018 Yang Telah Digunakan Untuk Mendukung Pencapaian Sasaran Yang Telah Ditetapkan Dalam Rencana Strategis Anggaran Dipa 03	58
Tabel 37.	Rekapitulasi Realisasi Anggaran DIPA 005.01.2.097467 dan DIPA 005.03.2.099062 Tahun Anggaran 2018	62

DAFTAR GRAFIK

	Halaman
Grafik 1. Capaian Persentase Sisa Perkara.....	24
Grafik 2. Capaian Persentase Penyelesaian	26
Grafik 3. Capaian Persentase penurunan sisa perkara	32
Grafik 4. Indikator Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi.....	36
Grafik 5. Penanganan Pengaduan.....	45

DAFTAR FOTO

	Halaman
Foto 1. Kantor Pengadilan Tinggi DKI Jakarta.....	7

RINGKASAN EKSEKUTIF

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta telah menetapkan 4 (empat) sasaran strategis yang akan dicapai dalam tahun 2018 berdasarkan reviu ke III Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Tinggi DKI Jakarta. Keempat sasaran strategis tersebut diukur dengan mengaplikasikan 9 (sembilan) indikator kinerja dan 9 (sembilan) target kinerja.

Secara umum dapat disimpulkan bahwa dari 4 (empat) sasaran strategis yang ditetapkan dalam Penetapan Kinerja Tahun 2018 terdapat 2 (dua) sasaran strategis yang berhasil dilaksanakan dengan baik, yaitu :

1. Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan, dan akuntabel.

Dengan indikator kinerja :

- Persentase sisa perkara yang diselesaikan
 - Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu
 - Persentase penurunan sisa perkara
 - Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi dan Peninjauan Kembali.
 - Indeks responden Pengadilan Tingkat Pertama yang puas terhadap layanan Pengadilan Tinggi
2. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia.
 - Presentase peningkatan produktifitas kinerja sumber daya manusia (SKP dan Penilaian Prestasi Kerja).

Sedangkan 2 (dua) sasaran strategis lainnya belum sepenuhnya dilaksanakan dengan baik /belum mencapai target yang telah ditetapkan, yaitu:

1. Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara

Dengan indikator kinerja :

- Persentase Salinan putusan yang dikirim ke Pengadilan Negeri Pengaju tepat waktu.

- Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 (satu) hari setelah diputus.
2. Peningkatan kualitas Pengawasan
- Presentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti.

Secara keseluruhan tingkat capaian kinerja Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tahun 2018 sebesar **97,27%**. Capaian LKjIP tahun ini mengalami kenaikan dari tahun 2017 sebesar **8,91%**. Kenaikan ini disebabkan karena adanya monitoring dan evaluasi terhadap capaian kinerja Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang menghasilkan perubahan terhadap target pada:

1. Persentase penurunan sisa perkara.
2. Persentase Perkara yang tidak mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali (PK).

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta juga merubah indikator kinerja pada sasaran strategis Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia menjadi Persentase Peningkatan Produktifitas Kinerja Sumber Daya Manusia (SKP Dan Penilaian Prestasi Kerja).

Rincian pencapaian masing-masing indikator tiap sasaran strategis dapat diilustrasikan dalam tabel berikut :

SASARAN STRATEGIS 1					
TERWUJUDNYA PROSES PERADILAN YANG PASTI, TRANSPARAN DAN AKUNTABEL					
INDIKATOR KINERJA	TARGET 2018	REALISASI 2018	CAPAIAN 2018	CAPAIAN	
				2017	2016
a Persentase sisa perkara yang diselesaikan					
• Perkara Perdata	100%	100%	100%	100%	100%
• Perkara Pidana	100%	100%	100%	100%	100%
• Perkara Tipikor	100%	100%	100%	100%	100%
b Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu					
• Perkara Perdata	94%	104,96%	111,65%	96,88%	91,59%
• Perkara Pidana	95%	100%	105,26%	106,65%	104,55%
• Perkara Tipikor	95%	109,67%	115,44%	102,86%	101,69%

c	Persentase penurunan sisa perkara					
	• Perkara Perdata	-10%	-8,28	82,8%	94,66%	NA
	• Perkara Pidana	-90%	-100%	111,11%	99,27%	NA
	• Perkara Tipikor	30%	33,33	111,10%	100%	NA
d	Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum :					
	• Kasasi					
	○ Perkara Perdata	80%	72,95%	91,18%	98,12%	NA
	○ Perkara Pidana	70%	70,66%	100,94%	98,69%	NA
	○ Perkara Tipikor	60%	57,89%	96,48%	99,65%	NA
	• Peninjauan Kembali (PK)					
	○ Perkara Perdata	95%	90,86%	95,64%	99,69%	NA
	○ Perkara Pidana	95%	104,91%	110,43%	99,68%	NA
	○ Perkara Tipikor	95%	106,89%	112,51%	99,20%	NA
e	Index responden Pengadilan Tingkat Pertama yang puas terhadap layanan Pengadilan Tinggi	75 (IKM)	77,67%	103,56%	101,88%	NA
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA SASARAN STRATEGIS 1				103,64%		

SASARAN STRATEGIS 2						
PENINGKATAN EFEKTIFITAS PENGELOLAAN PENYELESAIAN PERKARA						
INDIKATOR KINERJA	TARGET 2018	REALISASI 2018	CAPAIAN	CAPAIAN		
			2018	2017	2016	
a	Persentase salinan putusan yang dikirim ke Pengadilan Pengaju Tepat Waktu.					
	• Perkara Perdata	100%	98,99%	98,99%	63,82%	NA
	• Perkara Pidana	100%	98,83%	98,83%	90,44%	NA
	• Perkara Tipikor	100%	100%	100%	97,64%	NA
b	Persentase putusan perkara yang menarik perhatian					

masyarakat yang dapat diakses secara <i>online</i> dalam waktu 1 (satu) hari setelah diputus Perkara Tipikor	100%	12,90%	12,90%	0%	82,73%
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA SASARAN STRATEGIS 2			77,68%		

SASARAN STRATEGIS 3					
PENINGKATAN KUALITAS PENGAWASAN					
INDIKATOR KINERJA	TARGET 2018	REALISASI 2018	CAPAIAN		
			2018	2017	2016
Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	100%	87,5%	87,5%	66,66%	91,52%
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA SASARAN STRATEGIS 3			87,5%		

SASARAN STRATEGIS 4					
PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA					
INDIKATOR KINERJA	TARGET 2018	REALISASI 2018	CAPAIAN		
			2018	2017	2016
Persentase Peningkatan Produktifitas Kinerja Sumber Daya Manusia (SKP Dan Penilaian Prestasi Kerja)	100%	99,18%	99,18%	NA	NA
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA SASARAN STRATEGIS 4			99,18%		

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Evaluasi dan pertanggungjawaban Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dalam menjalankan tugas dan fungsi dituangkan dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang secara teknis berpedoman pada Peraturan Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tatacara Reviu Atas Laporan Kinerja Pemerintah.

Penyusunan Laporan Kinerja Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tahun 2018 mengacu pada Rencana Strategis Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tahun 2015-2019 yang telah dilakukan reviu menindaklanjuti Surat Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 192/KMA/SK/XI/2016 tanggal 9 Nopember 2016 tentang Penetapan Reviu Indikator Kinerja Utama Mahkamah Agung Republik Indonesia dan perlu disinkronisasi dengan Reviu Renstra Mahkamah Agung 2015-2019 serta surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 933/SEK/OT.01.3/10/2017 tentang Reviu Indikator Kinerja Utama (IKU) Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama.

Laporan Kinerja Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tahun 2018 ini merupakan laporan yang menggambarkan capaian kinerja berdasarkan target yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Tahun 2015-2019 dan Perjanjian Kinerja yang telah ditetapkan tahun 2018.

Dalam Laporan Kinerja Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tahun 2018 ini diuraikan mengenai pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU), pengukuran kinerja, analisis akuntabilitas kinerja, dan realisasi anggaran tahun 2018.

B. Kedudukan, Wewenang dan Fungsi

1. Kedudukan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sebagai penyelenggara kekuasaan kehakiman di daerah DKI Jakarta dan *voorpost* (kawal depan) Mahkamah Agung RI melaksanakan visi untuk turut serta mewujudkan Badan Peradilan Indonesia Yang Agung. Pengadilan Tinggi DKI Jakarta diharapkan mampu memberikan kontribusi guna

mewujudkan visi Mahkamah Agung RI ke depan, terutama dalam pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsinya dalam memeriksa dan mengadili perkara, serta dalam pelaksanaan pengawasan sebagai kawal depan (*voorpost*) Mahkamah Agung RI.

Kantor Pengadilan Tinggi DKI Jakarta diresmikan pada tanggal 23 Pebruari 1983 oleh Menteri Kehakiman RI. Dengan dibentuknya Pengadilan Tinggi DKI Jakarta ini, maka kebutuhan masyarakat pencari keadilan di Propinsi DKI Jakarta telah terwujud.

Wilayah hukum Pengadilan Tinggi DKI Jakarta meliputi 5 (lima) pengadilan negeri yang terdiri dari :

- a. Pengadilan Negeri Jakarta Pusat
- b. Pengadilan Negeri Jakarta Barat
- c. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan
- d. Pengadilan Negeri Jakarta Timur
- e. Pengadilan Negeri Jakarta Utara

Sebagai instansi pemerintah menurut Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), berkewajiban untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsi serta peranannya dalam pengelolaan sumberdaya, anggaran maupun kewenangan dalam melayani pencari keadilan.

Untuk itulah Pengadilan Tinggi DKI Jakarta menyusun Laporan Kinerja Instansi pemerintah (LKjIP) Tahun 2018.



(Kantor Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Jalan Letnan Jenderal Suprpto,
Cempaka Putih, Jakarta Pusat)

2. Wewenang dan Fungsi Pengadilan Tinggi DKI Jakarta

a. Wewenang

Pengadilan Tinggi sebagai salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman di lingkungan peradilan umum mempunyai tugas dan kewenangan sebagaimana disebutkan dalam Undang-undang RI Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, yang telah diubah dengan Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 2004, dan yang kedua dengan Undang-undang RI Nomor 49 Tahun 2009, di mana dalam pasal 51 dinyatakan bahwa :

- (1) Pengadilan Tinggi bertugas dan berwenang mengadili perkara pidana dan perkara perdata di Tingkat Banding.
- (2) Pengadilan Tinggi juga bertugas dan berwenang mengadili di Tingkat Pertama dan terakhir sengketa kewenangan mengadili antar Pengadilan Negeri di daerah hukumnya.

Di samping tugas dan kewenangan sebagaimana tersebut di atas, Pengadilan Tinggi juga dapat memberikan keterangan, pertimbangan, dan nasehat tentang hukum kepada instansi pemerintah di daerahnya apabila diminta (pasal 52 ayat 1 UU RI No. 2 Tahun 1986). Selain tugas dan kewenangan di atas,

Pengadilan Tinggi juga disertai tugas dan kewenangan lain oleh atau berdasarkan undang-undang (Pasal 52 ayat 2 UU RI No. 2 Tahun 1986), telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum.

b. Fungsi

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sebagai Pengadilan Tingkat Banding di Wilayah DKI Jakarta memiliki fungsi sebagai berikut:

1. Fungsi Mengadili (Judicial Power), yakni fungsi untuk memeriksa dan mengadili perkara-perkara yang menjadi kewenangannya, yang meliputi kewenangan mengadili perkara pada tingkat banding dan kewenangan mengadili ditingkat pertama dan terakhir menyangkut masalah sengketa mengadili antara Pengadilan Negeri di wilayah hukumnya.
2. Fungsi Pembinaan, yakni melakukan pembinaan, baik menyangkut teknis yustisial maupun teknis administrasi peradilan maupun administrasi umum secara berkala ataupun dalam waktu-waktu yang dipandang perlu.
3. Fungsi Pengawasan, yakni melakukan pengawasan pelaksanaan tugas secara menyeluruh kepada seluruh jajaran Pengadilan Negeri yang ada di wilayah Hukum Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, baik secara reguler maupun untuk waktu-waktu yang diperlukan untuk dijadikan bahan evaluasi atas kinerja masing-masing Pengadilan Negeri bersangkutan;
4. Fungsi Administratif, yakni menyelenggarakan administrasi umum, keuangan dan kepegawaian yang mendukung pelaksanaan tugas pokok yang menyangkut teknis peradilan maupun administrasi peradilan.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis Tahun 2015 – 2019

Tahun 2018 merupakan tahun keempat dari rencana strategis (Renstra) Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tahun 2015-2019. Visi Pengadilan Tinggi DKI Jakarta mengacu pada Visi Mahkamah Agung RI, yakni **“TERWUJUDNYA PENGADILAN TINGGI DKI JAKARTA YANG AGUNG”** dengan misi sebagai berikut :

- a. Menjaga kemandirian Pengadilan Tinggi DKI Jakarta;
- b. Memberikan Pelayanan Hukum yang berkeadilan kepada Pencari Keadilan;
- c. Meningkatkan Kualitas Kepemimpinan di Pengadilan Tinggi DKI Jakarta;
- d. Meningkatkan Kredibilitas dan Transparansi di Pengadilan Tinggi DKI Jakarta.

1. Tujuan dan Sasaran Strategis

a. Tujuan Strategis

Dalam Rencana Strategis telah dilakukan reviu terhadap tujuan, indikator tujuan, sasaran stretegis, indikator sasaran dan target yang telah ditetapkan. Rencana Strategis ini dilakukan berdasarkan rekomendasi hasil evaluasi Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) dari Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI.

Tujuan merupakan sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai dengan lima tahun. Penetapan tujuan disesuaikan dengan pernyataan visi dan misi Pengadilan Tinggi DKI Jakarta.

Adapun tujuan yang hendak dicapai oleh Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, seperti yang termuat dalam renstra adalah sebagai berikut :

1. Terwujudnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan melalui proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel.

Dengan indikator :

- Persentase sisa perkara yang diselesaikan.
- Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu.
- Persentase penurunan sisa perkara.
- Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi dan Peninjauan Kembali.

2. Terwujudnya peningkatan akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan,

Dengan indikator :

- Indeks responden pengadilan tingkat pertama yang puas terhadap layanan pengadilan tinggi.
- Persentase salinan putusan yang dikirim ke Pengadilan Pengaju Tepat Waktu.

3. Terwujudnya penyederhanaan proses penanganan perkara melalui pemanfaatan teknologi informasi.

Dengan indikator:

- Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 (satu) hari setelah diputus.

4. Terwujudnya pelayanan prima bagi masyarakat pencari keadilan

Dengan indikator:

- Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti.
- Persentase peningkatan produktifitas kinerja sumber daya manusia (SKP dan Penilaian Prestasi Kerja).

b. Sasaran Strategis

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka

waktu tertentu. Hasil Reviu yang telah dilakukan dalam Rencana Strategis, Pengadilan Tinggi DKI Jakarta mempertajam sasaran yang hendak dicapai pada tahun 2015-2019.

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta telah menetapkan 4 (empat) sasaran strategis yang hendak dicapai dalam Reviu Rencana Strategis Tahun 2015-2019 adalah sebagai berikut:

1. Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel
2. Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara.
3. Meningkatkan kualitas pengawasan.
4. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

Berdasarkan 4 (empat) sasaran strategis tersebut, bisnis inti (*core business*) Pengadilan Tinggi DKI Jakarta mengacu pada sasaran strategis (1). terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan, dan akuntabel (2). peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara. Sedangkan untuk sasaran strategis (3). Peningkatan kualitas pengawasan dan (4). Peningkatan kualitas sumber daya manusia. Merupakan sasaran tambahan yang dianggap perlu untuk menjalankan tugas sebagai kawal depan (*voorpost*) Mahkamah Agung RI.

2. Program Utama dan Kegiatan

Program dan kegiatan yang telah ditetapkan Mahkamah Agung RI sebagai pedoman Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berdasarkan sasaran strategis :

1. Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel.

Program yang digunakan dalam mendukung terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel melalui 3 (tiga) program yakni:

- a. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung melalui DIPA 01 Badan Urusan Administrasi untuk Belanja Pegawai dengan indikator

kinerja kegiatan Pembayaran gaji dan tunjangan, operasional dan pemeliharaan kantor.

- b. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum melalui DIPA 03 Badan Peradilan Umum untuk tersedianya operasional persidangan dengan indikator kegiatan biaya ATK Perkara, pengadaan dan penjilidan Salinan putusan dalam proses minutasi, belanja pengiriman surat dinas pos pusat (pengiriman salinan putusan), dan konsumsi pengamanan persidangan.
- c. Program peningkatan sarana dan prasarana di lingkungan Mahkamah Agung melalui DIPA 01 Badan Urusan Administrasi dalam hal pengadaan teknologi informasi pengembangan server, pengadaan alat pengolah data dan komunikasi pendukung Sistem Penelusuran Perkara (SIPP).

Kegiatan pokok untuk mencapai sasaran strategis peningkatan penyelesaian perkara melalui :

- 1) Persentase sisa perkara yang diselesaikan.
- 2) Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu.
- 3) Persentase penurunan sisa perkara.
- 4) Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi dan Peninjauan Kembali.
- 5) Index responden Pengadilan Tingkat Pertama yang puas terhadap layanan Pengadilan Tinggi.

2. Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara.

Program yang digunakan dalam mendukung peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara melalui 3 (tiga) program yakni:

- a. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum melalui DIPA 03 Badan Peradilan Umum untuk kegiatan pengiriman salinan putusan ke Pengadilan Negeri Pengaju yang lengkap dan tepat waktu (Perkara Pidana Umum dan Pidana Khusus

Tipikor), pengiriman surat penahanan, pengadaan dan penjilidan berkas perkara.

- b. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung melalui DIPA 01 Badan Urusan Administrasi
- c. Program peningkatan sarana dan prasarana di lingkungan Mahkamah Agung dalam hal pengadaan teknologi informasi pengembangan server, pengadaan alat pengolah data dan komunikasi pendukung Sistem Penelusuran Perkara (SIPP).

Kegiatan pokok untuk mencapai sasaran peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara adalah sebagai berikut :

- 1) Persentase salinan putusan yang dikirim ke Pengadilan Pengaju Tepat Waktu.
- 2) Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 (satu) hari setelah diputus.

3. Peningkatan kualitas pengawasan

Program yang digunakan dalam mendukung peningkatan penyelesaian perkara melalui Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum melalui DIPA 03 Badan Peradilan Umum untuk pembinaan dan pemeriksaan (pengawasan dan monitoring penyelesaian perkara).

Kegiatan pokok untuk mencapai sasaran peningkatan kualitas pengawasan dengan indikator sasaran persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti.

4. Peningkatan kualitas Sumber Daya Masyarakat

Program yang digunakan dalam mendukung peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia melalui program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum melalui DIPA 03 Badan Peradilan Umum untuk pertemuan/jamuan makan/delegasi untuk rapat

bulanan, pembinaan dan sosialisasi kebijakan Mahkamah Agung RI.

Kegiatan pokok untuk mencapai sasaran peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia dengan indikator sasaran persentase peningkatan produktifitas kinerja sumber daya manusia (SKP dan Penilaian Prestasi Kerja).

B. Perjanjian Kinerja Tahun 2018

Perjanjian Kinerja Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tahun 2018 menjadi tolok ukur evaluasi akuntabilitas kinerja pada tahun 2018. Perjanjian kinerja disusun berdasarkan Rencana Kinerja Tahun 2018 yang disusun pada awal tahun 2018. Dengan adanya review Renstra 2015-2019 dari IKU Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada tahun 2018, maka Perjanjian Kinerja Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang akan dicapai pada Tahun 2018 diselaraskan dengan sasaran hasil review yang telah dilaksanakan.

Dalam pemantauan penyelesaian Perkara Per Triwulan IV Tahun 2018 dilakukan revisi terhadap target indikator kinerja persentase penurunan sisa perkara, persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum dan penggantian sasaran strategis peningkatan Sumber Daya Manusia melalui indikator kinerja Persentase peningkatan produktifitas kinerja sumber daya manusia (SKP dan Penilaian Prestasi Kerja).

Tabel 1. Perjanjian Kinerja Tahun 2018 (setelah di revisi)

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA		TARGET
1. Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	a	Persentase sisa perkara yang diselesaikan 1. Perkara Perdata 2. Perkara Pidana 3. Perkara Tipikor	100% 100% 100%
	b	Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu 1. Perkara Perdata 2. Perkara Pidana 3. Perkara Tipikor	94% 95% 95%

	c	Persentase penurunan sisa perkara 1. Perkara Perdata 2. Perkara Pidana 3. Perkara Tipikor	-10% -90% 30%
	d	Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum : • Kasasi 1. Perkara Perdata 2. Perkara Pidana 3. Perkara Tipikor • Peninjauan Kembali (PK) 1. Perkara Perdata 2. Perkara Pidana 3. Perkara Tipikor	80% 70% 60% 95% 95% 95%
	e	Index responden Pengadilan Tingkat Pertama yang puas terhadap layanan Pengadilan Tinggi	75 (IKM)
2. Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a.	Persentase salinan putusan yang dikirim ke Pengadilan Pengaju Tepat Waktu. 1. Perkara Perdata 2. Perkara Pidana 3. Perkara Tipikor	100% 100% 100%
	b.	Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara <i>online</i> dalam waktu 1 (satu) hari setelah diputus - Perkara Tipikor	100%
3. Peningkatan kualitas pengawasan		Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	100%
4. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia		Persentase peningkatan produktifitas kinerja sumber daya manusia (SKP dan Penilaian Prestasi Kerja)	100%

Tabel 2. Perjanjian Kinerja Tahun 2018 (sebelum di revisi)

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	
5. Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	a	Persentase sisa perkara yang diselesaikan 1. Perkara Perdata 2. Perkara Pidana 3. Perkara Tipikor	100% 100% 100%
	b	Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu 1. Perkara Perdata 2. Perkara Pidana 3. Perkara Tipikor	94% 95% 95%
	c	Persentase penurunan sisa perkara 1. Perkara Perdata 2. Perkara Pidana 3. Perkara Tipikor	15% 47% 50%
	d	Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum : • Kasasi 1. Perkara Perdata 2. Perkara Pidana 3. Perkara Tipikor • Peninjauan Kembali (PK) 4. Perkara Perdata 5. Perkara Pidana 6. Perkara Tipikor	39% 36% 35% 66% 82% 90%

	e	Index responden Pengadilan Tingkat Pertama yang puas terhadap layanan Pengadilan Tinggi	75 (IKM)
6. Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a.	Persentase salinan putusan yang dikirim ke Pengadilan Pengaju Tepat Waktu. 1. Perkara Perdata 2. Perkara Pidana 3. Perkara Tipikor	100% 100% 100%
	b.	Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara <i>online</i> dalam waktu 1 (satu) hari setelah diputus - Perkara Tipikor	100%
7. Peningkatan kualitas pengawasan		Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	100%
8. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia		Persentase Hakim yang lulus eksaminasi Hakim Tinggi dalam rangka promosi jabatan	100%

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Tahun 2018

Capaian kinerja Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tahun 2018 merupakan pencapaian atas target kinerja tahun keempat dari rencana strategis Pengadilan Tinggi DKI Jakarta 2015-2019.

Analisis capaian kinerja Tahun 2018 dilakukan dengan cara:

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun 2018.
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2018 dengan tahun 2017 dan tahun 2016.
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2018 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi.
4. Melakukan analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.
5. Melakukan analisis atas efisiensi penggunaan Sumber Daya.
6. Melakukan analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Secara umum terdapat beberapa keberhasilan pencapaian target kinerja, namun demikian terdapat juga beberapa target yang belum tercapai dalam tahun 2018 ini.

Rincian tingkat capaian kinerja masing-masing indikator kinerja tersebut diuraikan dalam tabel di bawah ini:

Tabel. 3 Hasil Pengukuran Kinerja

SASARAN STRATEGIS 1					
TERWUJUDNYA PROSES PERADILAN YANG PASTI, TRANSPARAN DAN AKUNTABEL					
INDIKATOR KINERJA	TARGET 2018	REALISASI 2018	CAPAIAN 2018	CAPAIAN	
				2017	2016
a Persentase sisa perkara yang diselesaikan					
• Perkara Perdata	100%	100%	100%	100%	100%
• Perkara Pidana	100%	100%	100%	100%	100%
• Perkara Tipikor	100%	100%	100%	100%	100%
b Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu					
• Perkara Perdata	94%	104,96%	111,65%	96,88%	91,59%
• Perkara Pidana	95%	100%	105,26%	106,65%	104,55%
• Perkara Tipikor	95%	109,67%	115,44%	102,86%	101,69%
c Persentase penurunan sisa perkara					
• Perkara Perdata	-10%	-8,28	82,8%	94,66%	NA
• Perkara Pidana	-90%	-100%	111,11%	99,27%	NA
• Perkara Tipikor	30%	33,33	111,10%	100%	NA
d Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum :					
• Kasasi					
○ Perkara Perdata	80%	72,95%	91,18%	98,12%	NA
○ Perkara Pidana	70%	70,66%	100,94%	98,69%	NA
○ Perkara Tipikor	60%	57,89%	96,48%	99,65%	NA
• Peninjauan Kembali (PK)					
○ Perkara Perdata	95%	90,86%	95,64%	99,69%	NA
○ Perkara Pidana	95%	104,91%	110,43%	99,68%	NA
○ Perkara Tipikor	95%	106,89%	112,51%	99,20%	NA
e Index responden Pengadilan Tingkat Pertama yang puas terhadap layanan Pengadilan Tinggi					
	75 (IKM)	77,67%	103,56%	101,88%	NA

RATA-RATA CAPAIAN KINERJA SASARAN STRATEGIS 1			99,64%		
SASARAN STRATEGIS 2					
PENINGKATAN EFEKTIFITAS PENGELOLAAN PENYELESAIAN PERKARA					
INDIKATOR KINERJA	TARGET 2018	REALISASI 2018	CAPAIAN 2018	CAPAIAN	
				2017	2016
a Persentase salinan putusan yang dikirim ke Pengadilan Pengaju Tepat Waktu.					
• Perkara Perdata	100%	98,99%	98,99%	63,82%	NA
• Perkara Pidana	100%	98,83%	98,83%	90,44%	NA
• Perkara Tipikor	100%	100%	100%	97,64%	NA
b Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara <i>online</i> dalam waktu 1 (satu) hari setelah diputus					
• Perkara Tipikor	100%	12,90%	12,90%	0%	82,73%
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA SASARAN STRATEGIS 2			77,68%		

SASARAN STRATEGIS 3					
PENINGKATAN KUALITAS PENGAWASAN					
INDIKATOR KINERJA	TARGET 2018	REALISASI 2018	CAPAIAN 2018	CAPAIAN	
				2017	2016
Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	100%	87,5%	87,5%	66,66%	91,52%
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA SASARAN STRATEGIS 3			87,50%		

SASARAN STRATEGIS 4					
PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA					
INDIKATOR KINERJA	TARGET 2018	REALISASI 2018	CAPAIAN 2018	CAPAIAN	
				2017	2016
Persentase peningkatan produktifitas kinerja sumber daya manusia	100%	99,18%	99,18%	NA	NA

(SKP dan Penilaian
Prestasi Kerja)

**RATA-RATA CAPAIAN KINERJA
SASARAN STRATEGIS 4**

99,18%

Catatan:

$$\text{Penghitungan capaian Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

Dari hasil pengukuran kinerja tersebut dapat disimpulkan bahwa secara umum Pengadilan Tinggi DKI Jakarta telah berhasil melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sesuai dengan capaian kinerja melebihi dari target indikator kinerja yang telah ditetapkan. Namun demikian dari sisi lain masih terdapat sebagian kecil dari target indikator kinerja dan sasaran strategis yang ditetapkan belum tercapai realisasinya.

Berikut ini adalah penjelasan dari masing-masing indikator kinerja pada tiap sasaran strategis:

☑ SASARAN 1: TERWUJUDNYA PROSES PERADILAN YANG PASTI, TRANSPARAN DAN AKUNTABEL.

Sasaran Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel adalah sasaran yang harus dicapai dalam rangka memenuhi tugas pokok dan fungsi pengadilan yang berorientasi pada pelayanan peradilan yang prima. Sasaran peningkatan penyelesaian perkara ini untuk mengukur peningkatan proses penyelesaian perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Peningkatan penyelesaian perkara ini diukur berdasarkan 5 (lima) indikator kinerja yang telah ditargetkan dengan realisasi kinerja Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tahun 2018 yang tercantum dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 4. Sasaran 1: Terwujudnya Proses Peradilan Yang Pasti,
Transparan dan Akuntabel

INDIKATOR KINERJA	TARGET 2018	REALISASI 2018	CAPAIAN 2018	CAPAIAN	
				2017	2016
a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan					
1. Perkara Perdata	100%	100%	100%	100	100
2. Perkara Pidana	100%	100%	100%	100	100
3. Perkara Tipikor	100%	100%	100%	100	100
b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu					
1. Perkara Perdata	94%	104,96%	111,65%	96,88%	91,59%
2. Perkara Pidana	95%	100%	105,26%	106,65%	104,55%
3. Perkara Tipikor	95%	109,67%	115,44%	102,86%	101,69%
c. Persentase penurunan sisa perkara					
1. Perkara Perdata	-10%	-8,28%	82,8%	94,66%	NA
2. Perkara Pidana	-90%	-100%	111,11%	99,27%	NA
3. Perkara Tipikor	30%	33,33%	111,10%	100%	NA
d. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum :					
• Kasasi					
1. Perkara Perdata	80%	72,95%	91,18%	98,12%	NA
2. Perkara Pidana	70%	70,66%	100,94%	98,69%	NA
3. Perkara Tipikor	60%	57,89%	96,48%	99,65%	NA
• Peninjauan Kembali (PK)					
1. Perkara Perdata	90%	90,86%	95,64%	99,69%	NA
2. Perkara Pidana	90%	104,91%	110,43%	99,68%	NA
3. Perkara Tipikor	90%	106,89%	112,51%	99,20%	NA
e. Indeks responden Pengadilan Tingkat Pertama yang puas terhadap layanan Pengadilan Tinggi	75	77,67%	103,56%	101,88%	NA

Kelima indikator sasaran ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan dan kepuasan masyarakat pencari keadilan dalam rangka azas peradilan yang cepat, murah, dan sederhana.

Perbandingan data diambil dari Laporan Tahunan tahun 2016 dan 2017 sebagai alat ukur perbandingan pengukuran kinerja tahun 2018.

Analisis kelima indikator kinerja dari sasaran pertama ini sebagai berikut:

a. Indikator Kinerja Persentase Sisa Perkara Yang Diselesaikan.

Indikator kinerja persentase sisa perkara yang diselesaikan adalah alat ukur penyelesaian sisa perkara tahun 2017 yang harus diselesaikan pada tahun 2018. Indikator kinerja ini dipergunakan untuk mengukur tingkat penyelesaian sisa perkara tahun 2017 yang selesai di tahun 2018.

Tabel 5. Sasaran 1 Indikator 1

	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Capaian	
		2018	2018	2018 (%)	2017 (%)	2016 (%)
a.	Persentase sisa perkara yang diselesaikan					
	1. Perkara Perdata	100%	100%	100	100	100
	2. Perkara Pidana	100%	100%	100	100	100
	3. Perkara Tipikor	100%	100%	100	100	100

Tabel 6. Penyelesaian sisa perkara Perdata, Pidana dan Tipikor.

Jenis Perkara	Sisa Perkara Tahun 2017	Sisa Perkara Tahun 2017 yang diselesaikan 2018
Perkara Perdata	157 Perkara	157 Perkara
Perkara Pidana	24 Perkara	24 Perkara
Perkara Tipikor	3 Perkara	3 Perkara

- Persentase sisa perkara perdata tahun 2017 yang diselesaikan 100% sejumlah (157 Perkara) dapat direalisasikan 100% maka capaian kinerjanya 100%.
- Persentase sisa perkara pidana tahun 2017 yang diselesaikan 100% sejumlah (24 Perkara) dapat direalisasikan 100% maka capaian kinerjanya 100%.
- Persentase sisa perkara tipikor tahun 2017 yang diselesaikan 100% sejumlah (3 Perkara) dapat direalisasikan 100% maka capaian kinerjanya 100%.

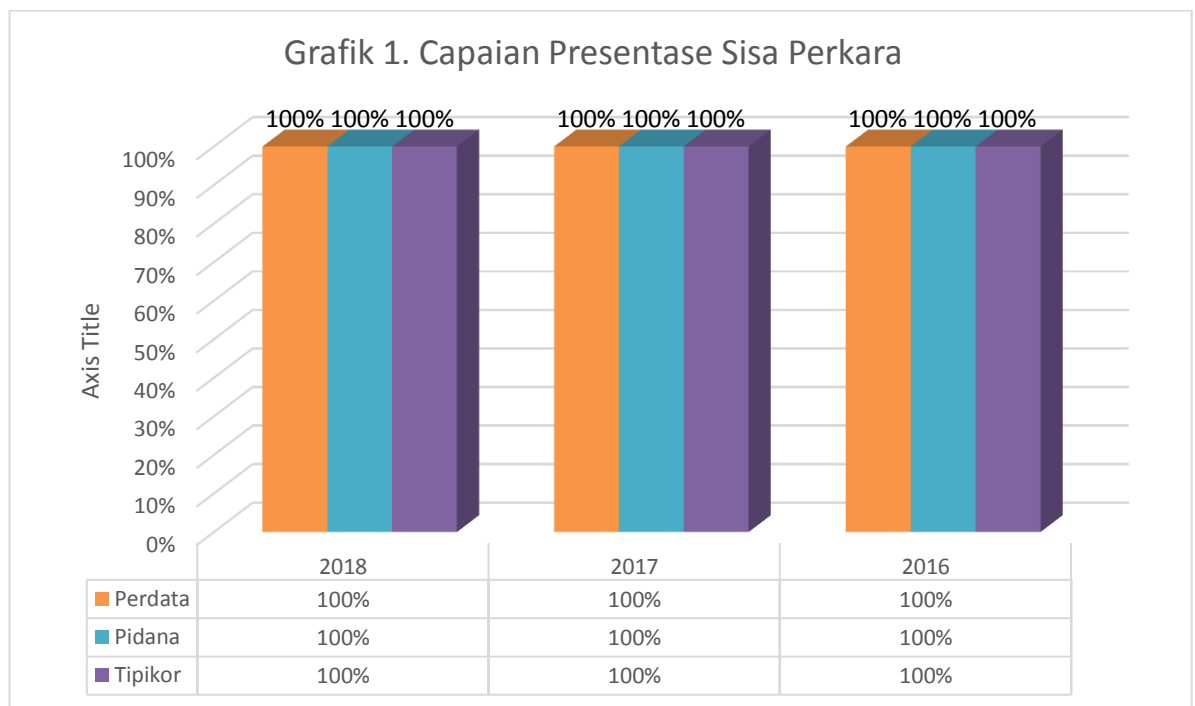
perbandingan persentase sisa perkara yang diselesaikan dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2018 selalu mencapai 100%. Keberhasilan ini dapat dijelaskan bahwa sisa perkara yang belum diselesaikan pada triwulan ke empat pada tahun sebelumnya harus diselesaikan pada triwulan pertama tahun berikutnya (karena terikat SEMA Nomor 2 Tahun 2014).

Adanya sisa perkara yang harus diselesaikan disebabkan :

1. Ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelesaian Perkara Di Pengadilan Tingkat Pertama Dan Tingkat Banding Pada 4 (Empat) Lingkungan Peradilan. Penyelesaian perkara pada Pengadilan Tingkat Banding paling lambat dalam waktu 3 (tiga) bulan untuk Perkara Pidana dan Perkara Perdata, dan 2 (dua) bulan untuk Perkara Tipikor (Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2014).
2. Berkas perkara yang diajukan banding dikirim oleh Pengadilan Negeri Pengaju pada triwulan ke-empat (akhir tahun).
3. Penyelesaian sisa perkara pada tahun 2017 yang mencapai target sebesar 100%, keberhasilan ini menunjukkan bahwa sistem kinerja yang berlaku di lingkungan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta telah berjalan sesuai dengan ketentuan yang dikeluarkan Mahkamah Agung, sehingga tidak ada sisa perkara tahun 2017 yang tidak selesai di tahun 2018.

Keberhasilan ini juga dikarenakan adanya monitoring dan evaluasi penyelesaian perkara yang diadakan setiap bulan dalam rapat evaluasi kinerja yang dipimpin oleh Ketua/Wakil Ketua dan Panitera Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang menekankan penyelesaian perkara harus diselesaikan tepat waktu.

Grafik 1. Capaian Persentase Sisa Perkara Yang Diselesaikan dalam Perkara Perdata, Perkara Pidana dan Perkara Tipikor Tahun 2017 di tahun 2018.



Berdasarkan realisasi dan capaian kinerja pada tahun 2018 diharapkan dapat mempertahankan capaian kerjanya sebesar 100% untuk tahun 2015 - 2019 sesuai dengan Rencana Strategis Jangka Menengah Ke Dua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta.

b. Indikator Kinerja Persentase Perkara Yang Diselesaikan Tepat Waktu

Indikator kinerja persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu adalah alat ukur penyelesaian perkara yang diselesaikan pada

tahun berjalan yaitu sisa awal tahun ditambah perkara yang diputus di tahun berjalan dibandingkan dengan jumlah perkara tahun berjalan ditambah jumlah sisa perkara tahun sebelumnya. Indikator kinerja ini dipergunakan untuk mengukur tingkat penyelesaian perkara yang diselesaikan tepat waktu tahun 2018.

Tabel 7. Sasaran 1 Indikator 2

INDIKATOR KINERJA	TARGET 2018	REALISASI 2018	CAPAIAN 2018 (%)	CAPAIAN	
				2017 (%)	2016 (%)
b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu.					
1. Perkara Perdata	94%	104,96%	111,65%	96,88%	96.36%
2. Perkara Pidana	95%	100%	105,26%	106,65	104,55
3. Perkara Tipikor	95%	109,67%	115,44%	102.86	100%

Persentase Perkara Yang Diselesaikan Tepat Waktu Perkara Perdata, Perkara Pidana dan Perkara Tipikor:

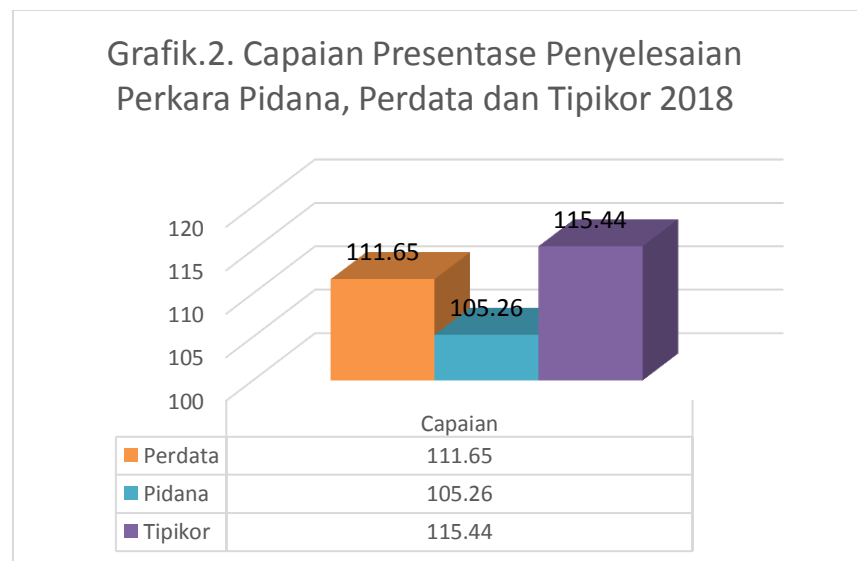
Tabel 8. Penyelesaian Perkara Perdata, Pidana, Tipikor

Diselesaikan Tepat Waktu	Harus Diselesaikan	Target	Realisasi	Capaian
Perkara Perdata	965 Perkara	907 Perkara	952 Perkara	111,65%
		94%	104,96%	
Perkara Pidana Umum dan Anak	477 Perkara	453 Perkara	453 Perkara	105.26%
		95%	100%	
Perkara Tipikor	33 Perkara	31 Perkara	34 Perkara	115,44%
		95%	109,67%	

- Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu untuk perkara perdata ditargetkan 94% (907 Perkara) dari total perkara perdata yang harus diselesaikan 965 perkara, direalisasikan 104,96% (952 perkara), maka capaian kinerja 111,65%.

- Persentase perkara yang diselesaikan untuk perkara pidana (Pidana Umum dan Pidana Anak) ditargetkan 95% (453 Perkara) dari total perkara pidana (Pidana Umum dan Pidana Anak) yang harus diselesaikan 477 perkara, direalisasikan 100% (453 perkara), maka capaian kinerja 105,26%.
- Persentase perkara yang diselesaikan untuk perkara tipikor ditargetkan 95% (31 Perkara) dari total perkara tipikor yang harus diselesaikan 33 perkara, direalisasikan 109,67% (34 perkara), maka capaian kinerja 115,44%.

Grafik 2. Capaian Persentase Penyelesaian Perkara Pidana, Perdata, dan Tipikor Tahun 2018



Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2018 dengan Tahun 2017 dan 2016.

▪ Perkara Perdata

Tabel perbandingan perkara perdata tahun 2018 dengan Tahun 2017 dan Tahun 2016 sebagai berikut:

Tabel 9. Perbandingan Perkara Perdata

Jenis Perkara	Sisa 2017	Masuk 2018	Jumlah	Putus 2018	Sisa 2018
Perkara Perdata	157	808	965	795	170
	Sisa 2016	Masuk 2017	Jumlah	Putus 2017	Sisa 2017
Perkara Perdata	183	784	967	810	157
	Sisa 2015	Masuk 2016	Jumlah	Putus 2016	Sisa 2016
Perkara Perdata	94	785	879	696	183

Tabel 10. Perbandingan Perkara Pidana

Jenis Perkara	Sisa 2017	Masuk 2018	Jumlah	Putus 2018	Sisa 2018
Perkara Pidana	24	453	477	429	48
	Sisa 2016	Masuk 2017	Jumlah	Putus 2017	Sisa 2017
Perkara Pidana	45	363	408	384	24
	Sisa 2015	Masuk 2016	Jumlah	Putus 2016	Sisa 2016
Perkara Pidana	42	426	468	423	45

Tabel 11. Perbandingan Perkara Tipikor

Perkara	Sisa 2017	Masuk 2018	Jumlah	Putus 2018	Sisa 2018
Perkara Tipikor	3	30	33	31	2
	Sisa 2016	Masuk 2017	Jumlah	Putus 2017	Sisa 2016
Perkara Tipikor	6	40	46	43	3
	Sisa 2015	Masuk 2016	Jumlah	Putus 2016	Sisa 2016
Perkara Tipikor	8	55	63	57	6

Persentase Perbandingan Pencapaian Kinerja Penyelesaian Perkara Tepat Waktu:

1. Perkara Perdata pada tahun 2018 pencapaiannya mengalami kenaikan sebesar 14,77% dibandingkan dengan pencapaian pada

tahun 2017 dan mengalami kenaikan sebesar 20,06% dari tahun 2016. Jumlah perkara yang ditangani pada Tahun 2018 mengalami penurunan sebesar 0,2%, mengalami penurunan pada penyelesaian putusan sebesar 1,8%, dan mengalami kenaikan sisa perkara sebesar 7,6% perkara.

2. Perkara Pidana pada tahun 2018 mencapai target yang telah ditetapkan sebesar 95% dengan capaian 105,26%. Namun, pencapaiannya mengalami penurunan 1,12%, dibandingkan dengan pencapaian pada tahun 2017, dan mengalami penurunan sebesar 0,71% dengan tahun 2016. Penurunan capaian kinerja ini dikarenakan kenaikan target yang ditetapkan dengan tahun sebelumnya sebesar 94% saat ini 95%. Dalam hal jumlah perkara yang masuk Tahun 2018 mengalami peningkatan sebesar 14,46%. Kenaikan kuantitas jumlah perkara berdampak pada kenaikan penyelesaian putusan yakni sebesar 10,4%, dan mengalami kenaikan sisa perkara sebesar 50%. Pengadilan Tinggi DKI Jakarta berhasil mencapai target penyelesaian perkara tepat waktu
3. Perkara Tipikor pada tahun 2018 pencapaiannya mengalami kenaikan sebesar 12,58% dibandingkan dengan pencapaian pada tahun 2017 dan mengalami kenaikan sebesar 13,75% dari tahun 2016. Perkara Tipikor mengalami penurunan jumlah perkara sebesar 28,2% yang mengajukan upaya hukum banding tindak pidana korupsi di Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, mengalami penurunan pada penyelesaian putusan sebesar 27,9%, dan untuk sisa perkara mengalami penurunan jumlah perkara sebanyak 33.33%.

Perbandingan persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2018 relatif meningkat karena capaian telah melampaui target, maka tahun berikutnya akan dipertahankan target yang telah ditetapkan, agar realisasi kinerja diharapkan meningkat.

Penyelesaian perkara masuk pada perkara perdata tahun 2018 tidak mencapai target yang telah ditetapkan sebesar 94%. Sedangkan untuk perkara pidana dan Tipikor telah berhasil mencapai target yang telah ditetapkan sebesar 95% . Keberhasilan ini menunjukkan bahwa sistem kerja yang berlaku di lingkungan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta telah berjalan sesuai dengan ketentuan yang dikeluarkan Mahkamah Agung.

Namun demikian masih terdapat perkara tahun 2018 yang belum terselesaikan, hal ini dikarenakan perkara tersebut diterima Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada Bulan November dan Desember Tahun 2018 sehingga tidak mungkin dapat diselesaikan pada tahun 2018.

Dengan demikian untuk tahun 2019 Pengadilan Tinggi DKI Jakarta masih mempertahankan target kinerja sebesar 94% untuk Perkara Perdata, Perkara Pidana 95% dan Tipikor 95% sebagaimana dalam reviu ke- II Rencana Strategis Jangka Menengah yang telah direncanakan.

Secara umum kenaikan capaian kinerja ini disebabkan:

- a. Monitoring dan evaluasi yang dilakukan Ketua dan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dalam setiap rapat evaluasi kinerja yang dilakukan setiap bulan terhadap kinerja penyelesaian perkara.
- b. Komitmen para Hakim Tinggi dalam penyelesaian perkara sesuai dengan SEMA Nomor 2 Tahun 2014.

c. Indikator Kinerja Persentase Penurunan Sisa Perkara.

Indikator kinerja persentase penurunan sisa perkara adalah alat ukur terhadap penyelesaian sisa perkara. Sisa perkara adalah perkara yang belum diputus pada tahun berjalan.

Tabel 12. Sasaran 1 Indikator 3.

INDIKATOR KINERJA	TARGET 2018	REALISASI 2018	CAPAIAN 2018 (%)	CAPAIAN	
				2017 (%)	2016 (%)
c. Persentase penurunan sisa perkara					
1. Perkara Perdata	-10%	-8,28%	82,8%	94.66%	NA
2. Perkara Pidana	-90%	-100%	111,11%	99,27%	NA
3. Perkara Tipikor	30%	33,33	111,10%	100%	NA

Ukuran realisasi indikator kinerja persentase penurunan sisa perkara merupakan perbandingan penurunan sisa perkara antara tahun berjalan dengan sisa perkara tahun sebelumnya. Sedangkan ukuran capaiannya adalah perbandingan antara persentase penurunan sisa perkara dengan target yang ditetapkan.

1. Perkara Perdata

Tahun 2018 Pengadilan Tinggi DKI Jakarta harus mengadili dan memutus perkara yang mengajukan upaya hukum banding untuk perkara Perdata, Pidana dan Tipikor sebanyak 1475 perkara.

Tabel 13. Sisa Perkara Tahun 2016 s/d 2018 Perkara Perdata

	Perkara Perdata	Sisa Perkara
1.	Tahun 2016	183
2.	Tahun 2017	157
3.	Tahun 2018	170

Jumlah sisa perkara tahun 2017 (157 perkara) dikurangi jumlah sisa perkara tahun 2018 (170 perkara) dibagi jumlah sisa perkara tahun 2017 (157 perkara) dikalikan 100% dengan target (-10%) maka realisasi persentase penurunan sisa perkara tahun 2018 adalah sebesar -8.28%, Sehingga persentase capaian penurunan sisa perkara pada tahun 2018 sebesar 82,80%.

2. Perkara Pidana

Tabel 14. Sisa Perkara Tahun 2016 s/d 2018 Perkara Pidana

	Perkara Pidana	Sisa Perkara
1.	Tahun 2016	45
2.	Tahun 2017	24
3	Tahun 2018	48

Realisasi persentase penurunan sisa perkara pidana tahun 2018 merupakan perbandingan jumlah sisa perkara tahun 2017 (24 perkara) dikurangi jumlah sisa perkara tahun 2018 (48 perkara) dibagi jumlah sisa perkara tahun 2017 (24 perkara) dikalikan 100% dengan target (-90%), maka terealisasi -100%. Persentase capaian penurunan sisa perkara pada tahun 2018 sebesar 111,11%

3. Perkara Tipikor

Tabel 15. Sisa Perkara Tahun 2016 s/d 2018 Perkara Tipikor

	Perkara Tipikor	Sisa Perkara
1.	Tahun 2016	6
2.	Tahun 2017	3
3.	Tahun 2018	2

Realisasi persentase penurunan sisa perkara pidana tahun 2018 adalah jumlah sisa perkara tahun 2017 (3 perkara) dikurangi jumlah sisa perkara tahun 2018 (2 perkara) dibagi jumlah sisa perkara tahun 2017 (3 perkara) dikalikan 100% dengan target 30% maka realisasi penurunan sisa perkara sebesar 33.3%. Persentase capaian penurunan sisa perkara pada tahun 2018 sebesar 111,10%

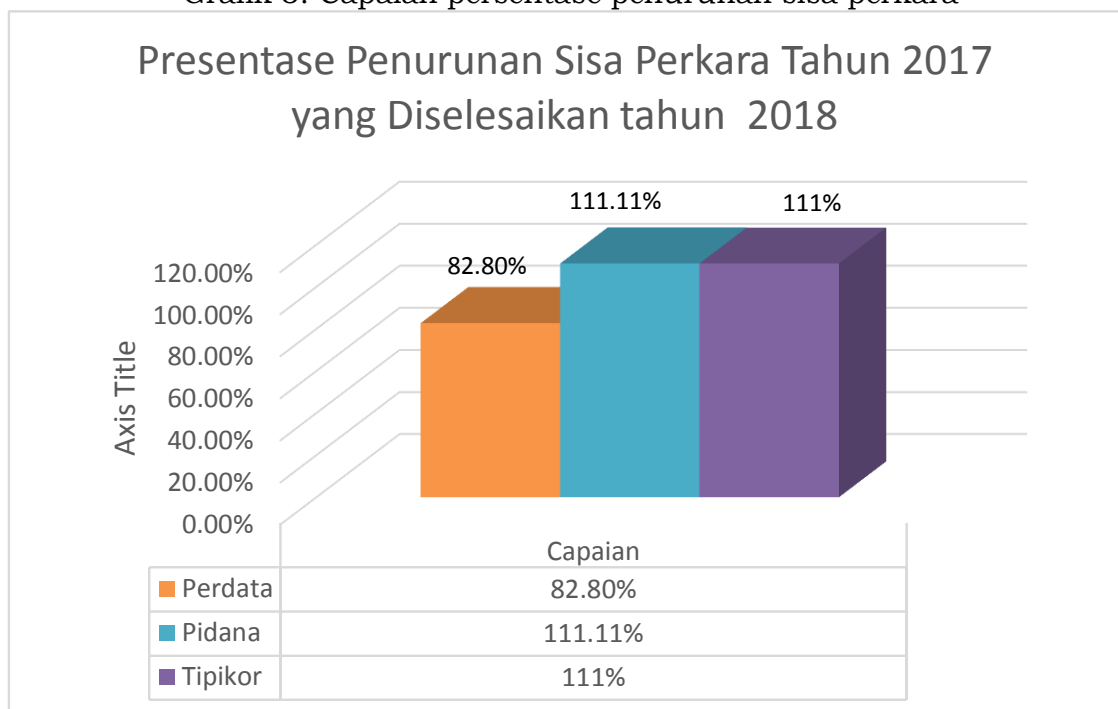
Keberhasilan ini dikarenakan adanya monitoring dan evaluasi penyelesaian perkara yang diadakan pada akhir triwulan ketiga untuk melakukan reuiu terhadap target yang

telah ditetapkan sebelumnya dengan memperhitungkan kondisi jumlah perkara masuk yang memungkinkan untuk diselesaikan.

Indikator penurunan sisa perkara ini merupakan salah satu indikator baru yang ditetapkan oleh Mahkamah Agung RI, sehingga untuk tahun 2016 belum ada data (target, realisasi dan capaian) yang dapat dijadikan pembandingan atas kinerja pencapaian sasaran yang berorientasi pada (*output*/dan *outcome*) ditetapkan dalam renstra sebelumnya.

Dengan demikian untuk tahun 2019 Pengadilan Tinggi DKI Jakarta akan melakukan penyesuaian target kinerja sebesar 10% untuk Perkara Perdata, 10% untuk Perkara Pidana, dan (-75%) untuk Perkara Tipikor sesuai revidi ke-II Rencana Strategis Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Tahun 2015-2019.

Grafik 3. Capaian persentase penurunan sisa perkara



d. Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum.

Indikator kinerja persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum adalah alat untuk mengukur kepuasan atas putusan pengadilan.

Tabel 16. Sasaran 1 Indikator 4

	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Capaian	
		2018	2018	2018 (%)	2017 (%)	2016 (%)
d.	Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum.					
	• Kasasi					
	1. Perkara Perdata	80%	72,95%	91,18%	98,12%	NA
	2. Perkara Pidana	70%	70,66%	100,94%	98,69%	NA
	3. Perkara Tipikor	60%	57,89%	96,48%	99,65%	NA
	• Peninjauan Kembali (PK)					
	1. Perkara Perdata	95%	90,86%	95,64%	99,69%	NA
	2. Perkara Pidana	95%	104,91%	110,43%	99,68%	NA
	3. Perkara Tipikor	95%	106,89%	112,51%	99,20%	NA

Upaya Hukum Kasasi

Upaya hukum Kasasi merupakan alat untuk mengukur tingkat kepuasan para pencari keadilan atas putusan yang dijatuhkan pada Pengadilan Tingkat Banding.

Penghitungan Indikator Kinerja Persentase perkara yang tidak mengajukan Upaya Hukum Kasasi dihitung dengan membandingkan jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi tahun 2018 dengan jumlah perkara yang diputus pada tingkat banding dikalikan 100%.

1. Perkara Perdata

Jumlah perkara perdata yang diputus pada pengadilan Tinggi DKI Jakarta tahun 2018 sebanyak 795 perkara (100%). Target yang ditetapkan sebesar 80% (636 perkara). Perkara yang mengajukan upaya hukum kasasi sebanyak 331 (41,63%),

sedangkan perkara perdata yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi sebanyak 464 perkara (58,36%), maka realisasi indikator kinerja sebesar 72,95% dan persentase capaian perkara perdata yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi pada tahun 2018 sebesar 91,18%.

2. Perkara Pidana

Jumlah perkara pidana yang diputus pada pengadilan Tinggi DKI Jakarta tahun 2018 sebanyak 429 perkara (100%). Target yang ditetapkan sebesar 70% (300 perkara). Perkara yang mengajukan upaya hukum kasasi sebanyak 217 (50,58%), sedangkan perkara pidana yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi sebanyak 212 perkara (49,41%), maka realisasi indikator kinerja sebesar 70,66% dan persentase capaian perkara pidana yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi pada tahun 2018 sebesar 100,94%.

3. Perkara Tipikor

Jumlah perkara tipikor yang diputus pada pengadilan Tinggi DKI Jakarta tahun 2018 sebanyak 31 perkara (100%). Target yang ditetapkan sebesar 60% (19 perkara). Perkara tipikor yang mengajukan upaya hukum kasasi sebanyak 20 (64,51%), sedangkan perkara tipikor yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi sebanyak 11 perkara (35,48%), maka realisasi indikator kinerja sebesar 57,89% dan persentase capaian perkara tipikor yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi pada tahun 2018 sebesar 96,48%.

Upaya Hukum Peninjauan Kembali (PK):

Penghitungan Indikator Kinerja Persentase perkara yang tidak mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali (PK) dihitung dengan membangunkan jumlah perkara yang tidak mengajukan

upaya hukum PK tahun 2018 dengan jumlah perkara yang diputus pada tingkat kasasi dikalikan 100%.

1. Perkara Perdata

Jumlah perkara perdata yang tidak mengajukan upaya hukum PK tahun 2018 (686 perkara), perkara yang diputus (795 perkara) dikalikan 100% maka realisasi indikator kinerja 90,86%. Target Persentase perkara perdata yang tidak mengajukan upaya hukum PK sebesar 95%. Persentase perkara perdata yang tidak mengajukan upaya hukum PK pada tahun 2017 sebesar 95,4%.

2. Perkara Pidana

Jumlah perkara pidana yang tidak mengajukan upaya hukum PK tahun 2018 (215 perkara), perkara yang diputus pada tingkat kasasi (429) dikalikan 100% maka realisasi indikator kinerja 104,91%. Target Persentase perkara pidana yang tidak mengajukan upaya hukum PK sebesar 95%. Persentase perkara pidana yang tidak mengajukan upaya hukum PK pada tahun 2018 sebesar 110,43%.

3. Perkara Tipikor

Jumlah perkara tipikor yang tidak mengajukan upaya hukum PK tahun 2018 (31 perkara), perkara yang diputus pada tingkat kasasi (31) dikalikan 100% maka realisasi indikator kinerja 106,89%. Target Persentase perkara tipikor yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi sebesar 95%. Persentase perkara tipikor yang tidak mengajukan upaya hukum PK pada tahun 2018 sebesar 112,5%

Perbandingan persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi tahun 2018 dengan tahun 2017 dan tahun 2016 sebagai berikut:

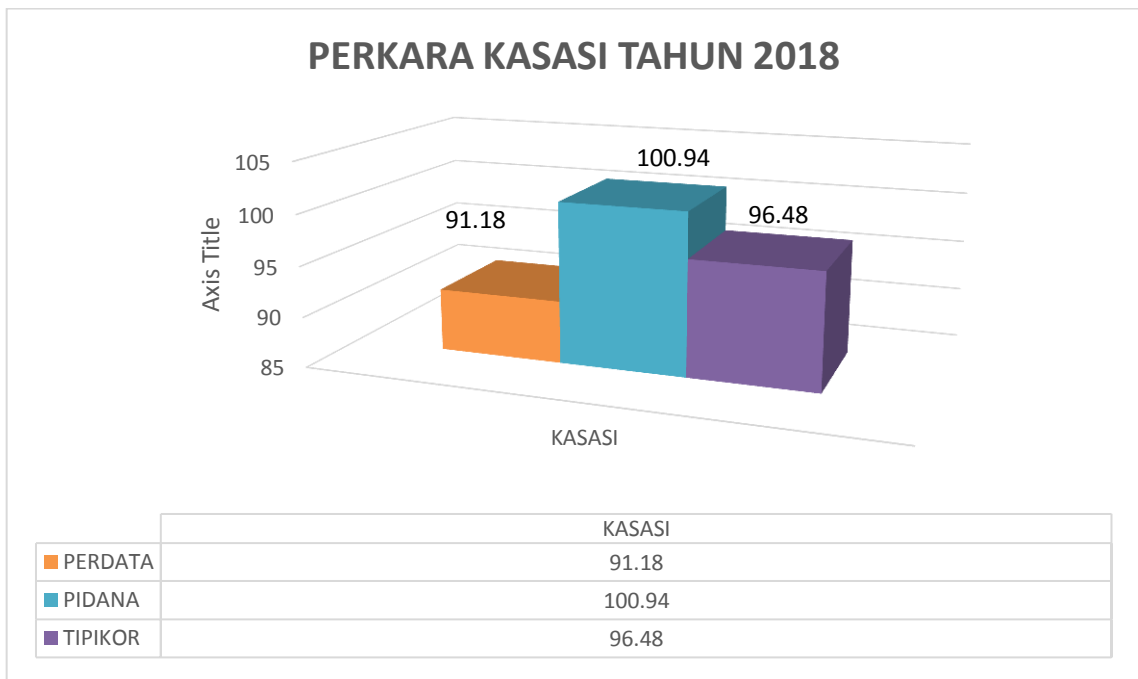
Tabel 17. Perbandingan persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi

No	Perkara	Tahun 2018		Tahun 2017		Tahun 2016	
		Target	Tidak Kasasi	Target	Tidak Kasasi	Target	Tidak Kasasi
1.	Perdata	95%	464	39%	310	60%	194
2.	Pidana	95%	212	36%	145	60%	408
3.	Tipikor	95%	11	35%	15	30%	13
	TOTAL				327		615

Dalam memutus suatu perkara idealnya semua pihak yang berperkara dapat menerima putusan hakim, sehingga tidak perlu ada upaya hukum kasasi.

Adanya upaya hukum kasasi ini dikarenakan tingkat kepuasan tergantung kepada para pencari keadilan, karena rasa keadilan tergantung dari kepuasan para pihak, dan tingkat kepuasan bersifat relatif, sehingga apapun bentuk putusan yang menurut majelis hakim sudah dianggap adil, namun para pihak tetap menyatakan tidak adil.

Grafik 4. Indikator Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi



e. Index Responden Pengadilan Tingkat Pertama Yang Puas Terhadap Layanan Pengadilan Tinggi.

Indikator kinerja index responden pengadilan tingkat pertama yang puas terhadap layanan pengadilan tinggi adalah alat untuk mengukur kepuasan layanan pengadilan tinggi kepada pengadilan tingkat pertama di wilayah hukum Pengadilan Tinggi DKI Jakarta.

Tabel 18. Sasaran 1 Indikator 5

	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Capaian	
		2018	2018	2018 (%)	2017 (%)	2016 (%)
e.	Index responden Pengadilan Tingkat Pertama yang puas terhadap layanan pengadilan tinggi	75	77,67	103,56	101,88	NA

- Berdasarkan Hasil survei kepuasan pelanggan terhadap 9 (sembilan) ruang lingkup layanan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dengan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) sebesar 77,67 dengan mutu pelayanan Baik.

Tabel 19. Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta

NO	RUANG LINGKUP UNSUR PELAYANAN	NILAI RATA-RATA	MUTU PELAYANAN	PERINGKAT
U1	PERSYARATAN	3,14	BAIK	3
U2	SISTEM, MEKANISME, DAN PROSEDUR	3,12	BAIK	4
U3	WAKTU PENYELESAIAN	2,95	BAIK	8
U4	BIAYA / TARIF	3,09	BAIK	6
U5	PRODUK SPESIFIKASI JENIS PELAYANAN	2,84	BAIK	9
U6	KOMPETENSI PELAKSANA	3,15	BAIK	2
U7	PERILAKU PELAKSANA	3,11	BAIK	5
U8	SARANA DAN PRASARANA	3,05	BAIK	7
U9	PENANGANAN PENGADUAN, SARAN DAN MASUKAN	3,51	SANGAT BAIK	1

Capaian kinerja indeks responden Pengadilan Tingkat Pertama yang puas terhadap layanan Pengadilan Tinggi dengan target sebesar 75% ($77,67/75 \times 100$)= 103,56%.

Realisasi ini menunjukkan bahwa pelayanan yang dilakukan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta termasuk dalam mutu pelayanan baik.

Adapun umpan balik dalam menindaklanjuti unsur layanan terhadap 3 (tiga) yang memiliki peringkat terendah yakni :

a. Unsur Produk Spesifikasi Jenis Layanan

Unsur Produk Spesifikasi Jenis Layanan menjadi peringkat terendah dalam survey dengan hasil nilai rata-rata 2,84. Ruang lingkup unsur pelayanan ini mengukur kesesuaian produk pelayanan antara yang tercantum dalam standar pelayanan dengan hasil yang diberikan.

Berdasarkan hasil survey unsur pelayanan ini Kebijakan Pimpinan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta telah melakukan penyesuaian/ revisi terhadap Standar Operasional Pelayanan (SOP) dan Standar Pelayanan Peradilan (SPP) pada Bulan November dan telah berlaku efektif tanggal 3 Januari 2019

b. Unsur Waktu Penyelesaian

Menyangkut kriteria terendah kedua yakni unsur Waktu Penyelesaian, berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding Pada 4 (empat) Lingkungan Peradilan, bahwa proses penyelesaian perkara pada tingkat banding paling lambat dalam waktu 3 (tiga) bulan. Berdasarkan data Pengadilan Tinggi DKI Jakarta terdapat 11,06% (88 Perkara dari 795 perkara perdata yang diputus) dan 0,23% (1 Perkara dari 429 perkara

pidana yang diputus) yang penyelesaian perkaranya lebih dari 3 Bulan.

c. Unsur Sarana dan Prasarana

Menyangkut unsur layanan Sarana dan Prasarana masuk ke peringkat 3 terendah dalam survey kepuasan masyarakat dengan nilai rata-rata 3,05 kategori baik. Menindaklanjuti hasil survey ini Pengadilan Tinggi DKI Jakarta berupaya meningkatkan fasilitas kenyamanan kepada Pengadilan Negeri, Pencari Keadilan dan masyarakat yang datang ke Pengadilan Tinggi dengan menyiapkan ruang tunggu yang dilengkapi dengan air conditioner (ac), fasilitas air minum gratis, dan surat kabar harian, serta ruang laktasi bagi ibu menyusui.

Berdasarkan perhitungan realisasi sebagaimana yang telah ditargetkan dalam Rencana Strategis 2015-2019 sebesar 75 dengan mutu pelayanan baik telah dicapai.

Indikator kinerja indeks responden pengadilan tingkat pertama yang puas terhadap layanan pengadilan tinggi tahun 2018 (103,56) mengalami peningkatan sebesar 1,68 dari capaian tahun 2017 (101,88).

☑ SASARAN 2 : PENINGKATAN EFEKTIFITAS PENGELOLAAN PENYELESAIAN PERKARA

Sasaran peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesain perkara adalah sasaran yang harus dicapai dalam rangka memenuhi tugas pokok dan fungsi pengadilan yang berorientasi pada pelayanan peradilan yang prima. Sasaran peningkatan penyelesaian perkara ini untuk mengukur peningkatan proses penyelesaian perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara ini diukur berdasarkan 2 (dua) indikator kinerja yang telah ditargetkan

dengan realisasi kinerja Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tahun 2018 yang tercantum dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 20. Sasaran 2, Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara

INDIKATOR KINERJA	TARGET 2018	REALISASI 2018	CAPAIAN 2018	CAPAIAN	
				2017	2016
a. Persentase Salinan putusan yang dikirim ke Pengadilan Negeri Pengaju Tepat Waktu					
1. Perkara Perdata	100%	98,99%	98,99%	63,82%	NA
2. Perkara Pidana	100%	98,83%	98,83%	90,44%	NA
3. Perkara Tipikor	100%	100%	100%	97,64%	NA
b. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara <i>online</i> dalam waktu 1 (satu) hari setelah diputus					
Perkara Tipikor	100%	12.90%	12.90%	0%	82,73%

a. Persentase Salinan Putusan Yang Dikirim Ke Pengadilan Negeri Pengaju Tepat Waktu

Indikator kinerja persentase salinan putusan yang dikirim ke Pengadilan Negeri Pengaju Tepat Waktu adalah alat ukur pengiriman Salinan kepada pengadilan negeri pengaju sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2011 tentang perubahan Sema 02 Tahun 2010 tentang penyampaian Salinan dan petikan putusan.

Dalam Sema Nomor 1 Tahun 2011 menyatakan bahwa :

1. Pengadilan yang memeriksa dan mengadili perkara perdata sudah harus menyediakan salinan putusan untuk para pihak dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja sejak putusan diucapkan. Karena salinan putusan dalam perkara perdata dikenakan biaya PNBPN, maka

penyampaian salinan putusan tersebut harus atas permintaan pihak yang bersangkutan.

2. Untuk perkara pidana pengadilan wajib menyampaikan salinan putusan dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak putusan diucapkan kepada Terdakwa atau penasihat hukumnya, Penyidik, dan Penuntut Umum, kecuali untuk perkara cepat diselesaikan sesuai dengan ketentuan KUHAP;
3. Petikan putusan perkara pidana diberikan kepada Terdakwa, Penuntut Umum dan Rumah Tahanan Negara atau Lembaga Pemasyarakatan segera setelah Putusan diucapkan;

Persentase salinan putusan perkara perdata yang dikirim ke Pengadilan Negeri Pengaju tepat waktu ditargetkan 100% (795 Perkara) dari total perkara yang putus 795 perkara, direalisasikan 98,99% (787 perkara), maka capaian kinerja 98,99%.

Persentase salinan putusan perkara pidana yang dikirim ke Pengadilan Negeri Pengaju tepat waktu ditargetkan 100% (429 Perkara) dari total perkara yang putus 429 perkara, direalisasikan 98,83% (424 perkara), maka capaian kinerja 98,83%.

Persentase salinan putusan perkara Tipikor yang dikirim ke Pengadilan Negeri Pengaju tepat waktu ditargetkan 100% (31 Perkara) dari total perkara yang putus 31 perkara, direalisasikan 100% (31 perkara), maka capaian kinerja 100%.

Perbandingan persentase salinan putusan yang dikirim ke Pengadilan Negeri Pengaju Tepat Waktu tahun 2018 baru dapat dibandingkan dengan tahun 2017. Hal ini dikarenakan indikator kinerja ini termasuk dari salah satu indikator yang baru ditetapkan dalam Reviu II Rencana Strategis 2015-2019 pada bulan November 2017. Persentase salinan putusan yang dikirim ke Pengadilan Negeri Pengaju tepat waktu untuk perkara perdata mengalami peningkatan sebesar 35,17%, perkara pidana

mengalami peningkatan 8,39% dan perkara Tipikor mengalami peningkatan sebesar 2,36%.

Berdasarkan hasil capaian persentase salinan putusan perkara perdata, perkara pidana dan perkara tipikor yang dikirim ke Pengadilan Negeri Pengaju tepat waktu masih belum dapat memenuhi target yang telah ditetapkan. Dari 795 perkara perdata yang diputus di Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, hanya 787 perkara saja yang dikirim tepat waktu maksimal (14 hari) ke Pengadilan Negeri Pengaju.

Hasil capaian persentase salinan putusan yang dikirim ke Pengadilan Negeri Pengaju tepat waktu dari perkara pidana yang diputus ada 429 perkara, hanya 424 perkara yang dikirim tepat waktu maksimal (14 hari) ke pengadilan Negeri Pengaju

Untuk perkara tipikor hasil capaian persentase salinan putusan yang dikirim ke Pengadilan Negeri Pengaju tepat waktu dari 31 perkara yang diputus tidak ada perkara yang melebihi batas waktu 14 hari.

Kegagalan capaian kinerja dalam memenuhi target yang telah ditetapkan ini akan menjadi perhatian khusus pimpinan untuk menyiapkan kebijakan yang dapat menunjang indikator sasaran strategis dalam peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara. Untuk kedepan akan dilakukan monitoring dan evaluasi yang dilakukan secara terus menerus untuk memenuhi target yang telah ditetapkan dalam reviu ke II Rencana Strategis Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Tahun 2015-2019.

b. Indikator Kinerja Persentase Putusan Perkara Yang Menarik Perhatian Masyarakat Yang Dapat Diakses secara *Online* Dalam Waktu 1 (Satu) Hari Setelah Diputus.

Indikator Kinerja Persentase Putusan Perkara Yang Menarik Perhatian Masyarakat Yang Dapat Diakses secara *Online* Dalam Waktu 1 (Satu) Hari Setelah Diputus adalah alat ukur perkara yang telah diputus dan dipublikasikan dalam Direktori Putusan

Mahkamah Agung RI. Indikator ini bertujuan untuk mengukur kinerja kepaniteraan dalam mempublikasikan putusan untuk mewujudkan pelayanan prima bagi masyarakat pencari keadilan.

Tabel 21. Sasaran 2 Indikator 2

INDIKATOR KINERJA	TARGET 2018	REALISASI 2018	CAPAIAN 2018 (%)	CAPAIAN	
				2017 (%)	2016 (%)
b. Persentase Putusan Perkara Yang Menarik Perhatian Masyarakat Yang Dapat Diakses secara <i>Online</i> Dalam Waktu 1 (Satu) Hari Setelah Diputus (Perkara Tipikor)	100%	12.90	12.90	0	82,73

Persentase proses penyelesaian perkara yang dipublikasikan dengan target 100% (31 Perkara Tipikor) dari total perkara yang harus dipublikasikan 31 perkara tipikor, direalisasikan 12,90% (4 perkara), maka capaian kinerja 12,90%.

Ukuran realisasi indikator kinerja persentase Putusan Perkara Yang Menarik Perhatian Masyarakat Yang Dapat Diakses secara *Online* Dalam Waktu 1 (Satu) Hari Setelah Diputus merupakan perbandingan jumlah isi putusan perkara tipikor yang diupload di dalam website dengan jumlah perkara menarik perhatian masyarakat yang diputus. Sedangkan ukuran capaiannya merupakan perbandingan antara persentase realisasi dengan target yang ditetapkan.

Perbandingan persentase perkara tahun 2018 yang dipublikasikan dengan tahun 2017 mengalami kenaikan capaian sebesar 12.90% dan mengalami penurunan dari tahun 2016 sebesar 69,83%. Kegagalan capaian kinerja memenuhi target yang telah ditetapkan dikarenakan limitasi batas waktu pengunggahan (*upload*) putusan harus masuk dalam direktori putusan maksimal 1 (satu) hari setelah diputus.

Berdasarkan data kepaniteraan Tipikor dari 31 perkara yang diputus, seluruh perkara tersebut sudah dimasukkan ke dalam Direktori Putusan. Pengunggahan (*upload*) putusan perkara tipikor pada tahun 2018 ini tidak dimasukkan dalam jangka waktu 1 (satu) hari setelah diputus, pada prinsipnya karena unsur kehati-hatian. Dalam Standar Operasional Prosedur yang ada di Kepaniteraan Tipikor bahwa setelah proses putusan dan minutasi berkas akan dilakukan pemeriksaan ulang untuk mengantisipasi kesalahan pengetikan dalam putusan tersebut. Namun, untuk tahun 2019 akan dilakukan upaya untuk memenuhi target indikator sasaran strategis yang telah ditentukan dalam rencana strategis yang telah direviu.

☑ **SASARAN 3: PENINGKATAN KUALITAS PENGAWASAN**

Pencapaian sasaran peningkatan kualitas pengawasan pada tahun 2018 dibandingkan dengan tahun 2017 dan tahun 2016 sebagai berikut:

Tabel 22. Sasaran 3 Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti

INDIKATOR KINERJA	TARGET 2018	REALISASI 2018	CAPAIAN 2018 (%)	CAPAIAN	
				2017 (%)	2016 (%)
Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti.	100%	87,5%	87,5	66,66	91,52

Analisis indikator pada sasaran 3 sebagai berikut:

Indikator Kinerja Persentase Pengaduan Masyarakat Yang Ditindaklanjuti.

Indikator kinerja persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti adalah alat ukur capaian kinerja pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti sesuai dengan kewenangan

Pengadilan Tinggi Jakarta. Indikator ini bertujuan untuk mengukur kinerja Hakim Tinggi Pengawas Daerah (HATIWASDA) dalam menindaklanjuti pengaduan masyarakat yang di terima Pengadilan Tinggi Jakarta.

Berdasarkan data pengaduan yang masuk pada tahun 2017 sebanyak 8 pengaduan masuk, telah diproses dan ditindaklanjuti sebanyak 8 Pengaduan dengan capaian kinerja 87,5%. Penanganan pengaduan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada Tahun 2018 telah menerima 8 (delapan) surat pengaduan yang berasal dari masyarakat (pencari keadilan), dan Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI. Terhadap 8 (delapan) surat pengaduan tersebut telah dilakukan tindaklanjut terhadap keseluruhan laporan tersebut dengan rincian sebagai berikut:

Tabel. 23 Penanganan Pengaduan
Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Tahun 2018

No	Proses Penanganan Pengaduan	Jumlah Pengaduan	Ket
1.	Sudah diperiksa dan dilaporkan ke Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI	7	
2.	Dalam Proses Pemeriksaan	1	
Jumlah		8	

Grafik 5. Laporan Penanganan Pengaduan



Perbandingan berdasarkan data pengaduan yang masuk pada tahun 2016 sebanyak 59 pengaduan masuk, telah diproses dan ditindaklanjuti sebanyak 54 Pengaduan dengan capaian kinerja 91,52%.

Pada Tahun 2017 pengaduan yang masuk sebanyak 13 pengaduan masuk, telah diproses dan ditindaklanjuti dengan capaian kinerja 66,66%.

Perbandingan capaian kinerja persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti pada tahun 2018 mengalami peningkatan capaian kinerja dibandingkan dengan tahun 2017 sebesar 22,84%. Sedangkan jika dibandingkan dengan tahun 2016 mengalami penurunan $91,52\% - 87,5\% = 4,02\%$.

Pengaduan yang ditindaklanjuti tersebut biasanya pengaduan yang ditujukan kepada Pengadilan Negeri yang berada di bawah pengawasan Pengadilan Tinggi Jakarta.

☑ SASARAN 4: PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA

Persentase peningkatan produktifitas kinerja sumber daya manusia (SKP dan Penilaian Prestasi Kerja) adalah perbandingan jumlah pegawai dengan jumlah pegawai yang memiliki/mendapatkan nilai prestasi kerja sangat baik dan baik.

Indikator ini untuk mengukur kinerja sumber daya manusia yang memiliki produktifitas kinerja baik sesuai tugas pokok dan fungsinya.

Tabel 24. Sasaran 4, Persentase peningkatan produktifitas kinerja sumber daya manusia (SKP dan Penilaian Prestasi Kerja)

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	
			2018	2017
Persentase peningkatan produktifitas kinerja sumber daya manusia (SKP dan Penilaian Prestasi Kerja)	100	99,18	99,18	NA

Dari tabel data dan target yang telah ditetapkan realisasi nilai sangat baik dan baik sebesar 99,18% diperoleh dari jumlah pegawai yang memperoleh nilai SKP sangat baik dan baik (121 pegawai) dibagi jumlah pegawai 122 dikalikan 100%.

Capaian nilai sangat baik sebesar 99,18% diperoleh dari nilai realisasi SKP sangat baik (99,18%) dibagi dengan target (100%) dikalikan 100%.

Capaian presentase produktifitas kinerja sumber daya manusia dapat yaitu SKP tahun 2018 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 25. Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Tahun 2018

No	Uraian	Jumlah	Persentase
1	Jumlah pegawai (termasuk dengan hakim ad-hoc	122	
2	NILAI SKP:		
	Sangat Baik	34	27,86%
	Baik	87	71,31%
	Cukup	0	0%
	Tidak Membuat	1	0,81%

B. Realisasi Anggaran

Pengelolaan Keuangan adalah kegiatan mengelola anggaran yang telah dianggarkan Mahkamah Agung untuk Satuan Kerja Pengadilan Tinggi Jakarta dalam mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang bertujuan untuk memberikan pelayanan hukum kepada para pencari keadilan sesuai azas cepat, sederhana dan biaya ringan.

Pengelolaan keuangan ini terkait dengan program yang direncanakan dalam Rencana Strategis Jangka Menengah Tahap ke I, dan diwujudkan dalam Rencana Kerja Anggaran Kementerian Lembaga (RKA-KL) tahun 2018, DIPA- 005.01.2.097467 Badan Urusan Administrasi dan DIPA. 005.03.2.099062 Badan Peradilan Umum Pagu

Anggaran Rp. 39.658.961.000,- (Tiga puluh sembilan milyar enam ratus lima puluh delapan juta sembilan ratus enam puluh satu ribu rupiah) dengan rincian program yang akan dilaksanakan tercantum dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 26. Realisasi Anggaran Per Program tahun 2018

No	Jenis Program	Pagu Rp.	Realisasi		Sisa	
			Rp.	%	Rp.	%
1	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung RI	38.525.548.000	38.517.999.085	99,98	7.548.915	0,02
2	Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung	574.000.000	573.733.700	99,95	266.300	0,05
3	Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	559.413.000	554.838.824	99,18	4.574.176	0,82

PROGRAM 1 : PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA MAHKAMAH AGUNG.

Program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Mahkamah Agung adalah program dukungan manajemen dalam rangka menunjang tugas pokok dan fungsi pengadilan. Program ini bertujuan untuk meningkatkan kinerja aparatur peradilan yang berada di lingkungan Mahkamah Agung, mendapat alokasi anggaran Rp. 38.525.548.000,- (Tiga puluh delapan milyar lima ratus dua puluh lima juta lima ratus empat puluh delapan ribu rupiah).

Tabel 27. Rincian Penyerapan Belanja Pegawai Tahun Anggaran 2018

No	Jenis Belanja	Pagu	Realisasi	Sisa	Persentase
1.	Gaji pokok PNS	7.707.780.000	7.707.775.400	4.600	100%
2.	Pembulatan Gaji PNS	93.000	92.309	691	99,26%
3.	Tunjangan Suami / Isteri PNS	621.236.000	621.224.510	11.490	100%

4.	Tunjangan Anak PNS	113.552.000	113.551.936	64	100,00%
5.	Tunjangan Struktural PNS	109.940.000	109.940.000	0	100,00%
6.	Tunjangan Fungsional PNS	19.657.930.000	19.657.920.000	10.000	100,00%
7.	Tunjangan PPh PNS	3.690.364.000	3.690.363.628	372	100,00%
8.	Tunjangan Beras	276.717.000	276.716.820	180	100,00%
9.	Uang Makan PNS	1.164.704.000	1.164.630.000	74.000	99,99%
10.	Tunjangan Umum PNS	63.926.000	63.860.000	66.000	99,90%
11.	Tunjangan Hakim Ad Hoc	2.100.000.000	2.100.000.000	0	100,00%
	Jumlah	35.506.242.000	35.506.074.603	167.397	100,00%

Tabel 28. Rincian Penyerapan Belanja Non Operasional Perkantoran Tahun Anggaran 2018

No	Jenis Belanja	Pagu	Realisasi	Sisa	Persentase
1.	Pelantikan dan Pengambilan Sumpah Jabatan	40.000	0	40.000	0,00%
2.	Koordinasi/Konsultasi/Pembinaan/ Pengawasan/ Sosialisasi	132.175.000	131.864.301	310.699	99,76%
3.	Pertemuan/ Jamuan Tamu/ Delegasi	455.000	450.000	5.000	98,90%
4.	Penyusunan Pagu Anggaran Tahun 2019	18.500.000	18.349.000	151.000	100,00%
	Jumlah	151.170.000	150.663.301	506.699	99,66%

Tabel 29. Rincian Penyerapan Belanja Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran Tahun Anggaran 2018

No	Jenis Belanja	Pagu	Realisasi	Sisa	Persentase
1.	Keperluan Perkantoran/honor Honorar, Sampah, Penjilidan	674.684.000	674.680.500	3.500	100,00%
2.	Belanja Barang Persediaan/ Barang Konsumsi	179.092.000	179.089.000	3.000	100,00%
3.	Langganan Internet, Hosting Domain	61.500.000	61.454.978	45.022	99,93%
4.	Pengiriman surat dinas	14.520.000	14.458.614	61.386	99,58%
5.	Langganan Listrik	627.967.000	627.966.238	762	100,00%
6.	Langganan Telpon	43.612.000	43.611.866	134	100,00%
7.	Sewa mesin Foto Copy	18.432.000	18.359.850	72.150	99,61%
8.	Jasa Konsultan Perawatan IT dan Website	60.000.000	60.000.000	0	100,00%
9.	Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	419.295.000	419.276.498	18.502	100,00%
10.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	478.714.000	478.711.072	2.928	100,00%
11.	Honor Operasional Satuan Kerja	77.520.000	76.714.000	806.000	98,96%
12.	Pakaian Dinas Satpam, Supir	21.400.000		0	100,00%

	dan Pramubakti		21.400.000		
13.	Kesehatan Hakim Ad Hoc Tipikor	72.000.000	66.150.065	5.849.935	91,88%
14.	Sewa Rumah Dinas Hakim Ad Hoc Tipikor	105.000.000	105.000.000	0	100,00%
15.	Dokter dan Obat-obatan	14.400.000	14.388.500	11.500	99,92%
	JUMLAH	2.868.136.000	2.861.261.181	6.874.819	99,76

☑ PROGRAM 2 : PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR MAHKAMAH AGUNG

Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Mahkamah Agung adalah Program yang menunjang peningkatan kinerja aparatur Mahkamah Agung dalam rangka memenuhi kebutuhan sarana dan prasana Pengadilan Tinggi DKI Jakarta.

Pada tahun 2018 Pengadilan Tinggi DKI Jakarta mendapatkan alokasi anggaran untuk program peningkatan sarana dan prasarana sebesar Rp. 574.000.000,- (Lima ratus tujuh puluh empat juta rupiah).

Tabel 30. Rincian Penyerapan Belanja Peningkatan Sarana dan Prasarana Tahun Anggaran 2018

No	Jenis Belanja	Pagu	Realisasi	Sisa	Persentase
1.	Pengadaan peralatan fasilitas kantor/ AC, Meubelair, Lemari Berkas, Scanner	109.000.000	108.877.700	122.300	99,89%
2.	Alat Pengola Data dan Komunikasi/Laptop dan Kamera	465.000.000	464.856.000	144.000	99,97%
	Jumlah	574.000.000	573.733.000	266.300	99,95%

Tabel 31. Rekapitulasi Realisasi Anggaran DIPA : 005.01.2.097467 Badan Urusan Administrasi :

NO	Jenis Belanja	Pagu	Realisasi	Sisa	Persentase
1	Pembayaran Gaji dan Tunjangan Pegawai	35.506.242.000	35.506.074.603	167.397	100,00%
2	Belanja Barang Non Operasional Perkantoran	151.170.000	150.663.301	506.699	99,66%
3	Belanja Barang penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Pekantoran	2.868.136.000	2.861.261.181	6.874.819	99,76%
4	Program Peningkatan	574.000.000	573.733.000	266.300	99,95%

	Sarana dan Prasarana untuk Belanja Modal				
JUMLAH		39.099.548.000	39.091.732.785	8.815.215	99.98%

Perbandingan Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2016 – 2018 DIPA 005.01.2.097467 Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya, dan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur mengalami kenaikan penyerapan anggaran tahun 2016 sebesar 98,47%, Tahun 2017 sebesar 99,45% sedangkan Tahun 2018 sebesar 99,98%.

Tabel 32. Perbandingan Realisasi Anggaran DIPA 005.01.2.097467 Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung Tahun Anggaran 2016-2018

No	Tahun 2016	Pagu	Realisasi	Sisa	Persentase
1.	Belanja Pegawai	28.182.349.000	27.732.872.082	449.476.918	98,41%
	Belanja Barang	2.627.688.000	2.609.777.800	17.910.200	99,32%
	Belanja Modal	644.000.000	630.127.350	13.872.650	97,85%
	Jumlah	31.454.037.000	30.972.777.232	481.259.768	98,47%
2.	Tahun 2017	Pagu	Realisasi	Sisa	Persentase
	Belanja Pegawai	32.692.589.000	32.522.162.774	170.426.226	99,48%
	Belanja Barang	3.131.461.000	3.105.483.759	25.977.241	99,17%
	Belanja Modal	170.000.000	169.370.000	630.000	99,635
	Jumlah	35.994.050.000	35.797.016.533	197.033.467	99,45%
3.	Tahun 2018	Pagu	Realisasi	Sisa	Persentase
	Belanja Pegawai	35.506.242.000	35.506.074.603	167.397	100,00%
	Belanja Barang	3.019.306.000	3.011.924.482	7.381.518	99,76%
	Belanja Modal	574.000.000	573.733.700	266.300	99,95%
	Jumlah	39.099.548.000	39.091.732.785	7.815.215	99,98%

PROGRAM 3 : PROGRAM PENINGKATAN MANAJEMEN PERADILAN UMUM

Program peningkatan manajemen peradilan umum adalah program Badan Peradilan Umum yang menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi penyelesaian perkara Pidana, dan perkara Tipikor. Program ini mencakup terlaksananya penyelesaian Administrasi Perkara di tingkat banding yang diselesaikan tepat waktu mendapat alokasi anggaran . Untuk menunjang program ini telah dianggarkan sebesar

Rp.559.413.000,- (Lima ratus lima puluh sembilan juta empat ratus tiga belas ribu rupiah) .

Tabel 33. Penyerapan Anggaran Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum DIPA 005.03.2.099062 Tahun Anggaran 2018

No	Jenis Belanja	Pagu	Realisasi	Sisa	Persentase
1.	Penggandaan dan jilid Perkara Pidana	22.005.000	22.005.000	0	100,00%
2.	ATK Perkara Pidana	176.366.000	176.353.000	12.840	99,99%
3.	Penggandaan dan jilid Perkara Pidana (minutasi)	830.000	829.950	50	99,99%
4.	Pos Pusat/pengiriman salinan putusan Perkara Pidana	16.300.000	16.269.000	31.000	99,81%
5.	Perjalanan biasa/pengiriman berkas perkara Pidana	46.080.000	46.080.000	0	100,00%
6.	Penggandaan dan jilid Perkara Tipikor	3.330.000	3.329.000	510	99,98%
7.	ATK Perkara Tipikor	16.703.000	16.702.995	5	100,00%
8.	Penggandaan dan jilid Perkara Tipikor (minutasi)	50.000	0	50.000	0,00%
9.	Pos Pusat/pengiriman salinan putusan Perkara Tipikor	5.047.000	4.475.900	571.100	88,68%
10.	Perjalanan biasa/pengiriman berkas penahanan	200.000	0	200.000	0,00%
11.	Pembinaan/Pengawasan Pelayanan Publik ke Tingkat Pertama/Transport	21.000.000	20.975.000	25.000	99,88%
12.	Pembinaan dan Bimbingan Teknis Panitera Pengganti wilayah DKI Jkt	97.1884.000	96.911.500	972.000	99,01%
13.	Pembinaan dan Bimbingan Teknis Jurusita/Jurusita Pengganti wilayah DKI Jkt	67.993.000	65.842.929	2.150.071	96,84%
14.	Pembinaan dan Bimbingan Teknis Hakim wilayah DKI Jkt	82.025.000	81.463.900	561.100	99,32%
15.	Honor Korwil	3.600.000	3.600.000	0	100,00%
	Jumlah	559.413.000	554.838.824	4.574.176	99,18%

Perbandingan Realisasi Penyerapan Anggaran Tahun Anggaran 2016-2018 Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum,DIPA 005.03.2.099062 Badan Peradilan Umum Tahun Anggaran 2018 mengalami penurunan penyerapan anggaran dibandingkan dengan tahun sebelumnya, namun pagu anggaran untuk tahun 2018 lebih tinggi dari pada tahun sebelumnya walaupun persentase penyerapannya ada penurunnya sebesar 0,41%.

Tabel 34. Perbandingan Realisasi Anggaran DIPA 005.03.2.099062 Badan Peradilan Umum Tahun Anggaran 2016-2018

1.	Tahun 2016	Pagu	Realisasi	Sisa	Persentase
	Belanja Barang DIPA 03 BADILUM	138.825.000	137.185.060	639.940	99,54%
2.	Tahun 2017	Pagu	Realisasi	Sisa	Persentase

	Belanja Barang DIPA 03 BADILUM	213.856.000	212.984.774	871.226	99,59%
3.	Tahun 2018	Pagu	Realisasi	Sisa	Persentase
	Belanja Barang DIPA 03 BADILUM	559.413.000	554.838.824	4.574.176	99,18%

**Tabel 35. Realisasi Anggaran Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Th.2018
Yang Telah Digunakan Untuk Mendukung Pencapaian Sasaran Yang Telah Ditetapkan
Dalam Rencana Strategis Anggaran Dipa 01**

Tahun Anggaran :2018

Periode : Triwulan I

Perhitungan : kumulatif

No	Kode & Nama (Kegiatan, Output, Sub Output, Komponen)	Vol	Satuan	Alokasi Anggaran	Realisasi				
					Anggaran		Fisik		Kinerja Total
					Realisasi	Kinerja	Realisasi	Kinerja	
1	Layanan Dukungan Manajemen Satker Daerah dan Satker Baru (Non operasional)	12.00	Layanan	151,170,000	38,772,500	25.65 %	2.00	16.67 %	21.16 %
2	Gaji dan Tunjangan	12.00	Layanan	35,528,107,000	10,112,920,914	28.46 %	3.00	25.00 %	26.73 %
3	Operasional dan Pemeliharaan Kantor	12.00	Layanan	2,877,831,000	680,875,453	23.66 %	3.00	25.00 %	24.33 %
4	Pengadaan Peralatan Fasilitas Kantor	1.00	Unit	109,000,000	108,877,700	99.89 %	1.00	100.00 %	99.94 %
5	Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi	37.00	Unit	465,000,000	0	0.00 %	0.00	0.00 %	0.00 %

Tahun Anggaran :2018

Periode : Triwulan II

Perhitungan : kumulatif

No	Kode & Nama (Kegiatan, Output, Sub Output, Komponen)	Vol	Satuan	Alokasi Anggaran	Realisasi				
					Anggaran		Fisik		Kinerja Total
					Realisasi	Kinerja	Realisasi	Kinerja	
1	Layanan Dukungan Manajemen Satker Daerah dan Satker Baru (Non operasional)	12.00	Layanan	151,170,000	56,462,278	37.35 %	5.00	41.67 %	39.51 %
2	Gaji dan Tunjangan	12.00	Layanan	35,528,107,000	22,398,300,954	63.04 %	6.00	50.00 %	56.52 %
3	Operasional dan Pemeliharaan Kantor	12.00	Layanan	2,877,831,000	1,296,507,255	45.05 %	6.00	50.00 %	47.53 %
4	Pengadaan Peralatan Fasilitas Kantor	1.00	Unit	109,000,000	108,877,700	99.89 %	1.00	100.00 %	99.94 %
5	Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi	37.00	Unit	465,000,000	464,856,000	99.97 %	37.00	100.00 %	99.98 %

Tahun Anggaran :2018

Periode : Triwulan III

Perhitungan : kumulatif

No	Kode & Nama <i>(Kegiatan, Output, Sub Output, Komponen)</i>	Vol	Satuan	Alokasi Anggaran	Realisasi				
					Anggaran		Fisik		Kinerja Total
					Realisasi	Kinerja	Realisasi	Kinerja	
1	Layanan Dukungan Manajemen Satker Daerah dan Satker Baru (Non operasional)	12.00	Layanan	151,170,000	107,362,078	71.02 %	8.00	66.67 %	68.84 %
2	Gaji dan Tunjangan	12.00	Layanan	35,528,107,000	29,903,197,568	84.17 %	9.00	75.00 %	79.58 %
3	Operasional dan Pemeliharaan Kantor	12.00	Layanan	2,877,831,000	1,972,557,538	68.54 %	9.00	75.00 %	71.77 %
4	Pengadaan Peralatan Fasilitas Kantor	1.00	Unit	109,000,000	108,877,700	99.89 %	1.00	100.00 %	99.94 %
5	Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi	37.00	Unit	465,000,000	464,856,000	99.97 %	37.00	100.00 %	99.98 %

Tahun Anggaran :2018

Periode : Triwulan IV

Perhitungan : kumulatif

No	Kode & Nama (Kegiatan, Output, Sub Output, Komponen)	Vol	Satuan	Alokasi Anggaran	Realisasi				
					Anggaran		Fisik		Kinerja Total
					Realisasi	Kinerja	Realisasi	Kinerja	
1	Layanan Dukungan Manajemen Satker Daerah dan Satker Baru (Non operasional)	12.00	Layanan	151,170,000	150,663,301	99.66 %	12.00	100.00 %	99.83 %
2	Gaji dan Tunjangan	12.00	Layanan	35,528,107,000	35,506,074,603	99.94 %	12.00	100.00 %	99.97 %
3	Operasional dan Pemeliharaan Kantor	12.00	Layanan	2,877,831,000	2,861,261,181	99.42 %	12.00	100.00 %	99.71 %
4	Pengadaan Peralatan Fasilitas Kantor	1.00	Unit	109,000,000	108,877,700	99.89 %	1.00	100.00 %	99.94 %
5	Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi	37.00	Unit	465,000,000	464,856,000	99.97 %	37.00	100.00 %	99.98 %

**Tabel 36. Realisasi Anggaran Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Th.2018
Yang Telah Digunakan Untuk Mendukung Pencapaian Sasaran Yang Telah Ditetapkan
Dalam Rencana Strategis Anggaran DIPA 03**

Tahun Anggaran : 2018

Periode : Triwulan I

Perhitungan : kumulatif

No	Kode & Nama (Kegiatan, Output, SubOutput, Komponen)	Vol	Satuan	Alokasi Anggaran	Realisasi				
					Anggaran		Fisik		Kinerja Total
					Realisasi	Kinerja	Realisasi	Kinerja	
1	Pencatatan Register Perkara Banding	326.00	0	198,371,000	39,191,500	19.76 %	78.00	23.93 %	21.84 %
2	Minutasi	326.00	PKR	830,000	0	0.00 %	81.00	24.85 %	12.42 %
3	Pengiriman Salinan Putusan Kepada Pengadilan Pengaju	326.00	Perkara	16,300,000	1,133,500	6.95 %	882.00	270.55 %	138.75 %
4	Pengiriman Surat Penahanan	326.00	OK	46,080,000	5,585,000	12.12 %	92.00	28.22 %	20.17 %
5	Pencatatan Register Perkara Banding	20.00	PKR	20,033,000	1,461,250	7.29 %	4.00	20.00 %	13.65 %
6	Minutasi	20.00	Perkara	50,000	0	0.00 %	0.00	0.00 %	0.00 %
7	Pengiriman salinan putusan kepada Pengadilan pengaju	20.00	Perkara	5,047,000	770,000	15.26 %	4.00	20.00 %	17.63 %
8	Pengiriman surat penahanan	20.00	Perkara	200,000	0	0.00 %	6.00	30.00 %	15.00 %
9	Pembinaan/Pengawasan Pelayanan Publik oleh Tingkat Banding ke Tingkat Pertama	2.00	Satker	268,902,000	5,675,000	2.11 %	0.00	0.00 %	1.06 %
10	Pengelolaan Laporan Keuangan DIPA 03	24.00	SATKER	3,600,000	600,000	16.67 %	4.00	16.67 %	16.67 %

Tahun Anggaran :2018

Periode : Triwulan II

Perhitungan : kumulatif

No	Kode & Nama (Kegiatan, Output, Sub Output, Komponen)	Vol	Satuan	Alokasi Anggaran	Realisasi				
					Anggaran		Fisik		Kinerja Total
					Realisasi	Kinerja	Realisasi	Kinerja	
1	Pencatatan Register Perkara Banding	326.00	0	198,371,000	77,896,000	39.27 %	178.00	54.60 %	46.93 %
2	Minutasi	326.00	PKR	830,000	0	0.00 %	162.00	49.69 %	24.85 %
3	Pengiriman Salinan Putusan Kepada Pengadilan Pengaju	326.00	Perkara	16,300,000	5,616,500	34.46 %	1,485.00	455.52 %	244.99 %
4	Pengiriman Surat Penahanan	326.00	OK	46,080,000	12,685,000	27.53 %	144.00	44.17 %	35.85 %
5	Pencatatan Register Perkara Banding	20.00	PKR	20,033,000	1,970,250	9.84 %	5.00	25.00 %	17.42 %
6	Minutasi	20.00	Perkara	50,000	0	0.00 %	0.00	0.00 %	0.00 %
7	Pengiriman salinan putusan kepada Pengadilan pengaju	20.00	Perkara	5,047,000	1,462,500	28.98 %	8.00	40.00 %	34.49 %
8	Pengiriman surat penahanan	20.00	Perkara	200,000	0	0.00 %	12.00	60.00 %	30.00 %
9	Pembinaan/Pengawasan Pelayanan Publik oleh Tingkat Banding ke Tingkat Pertama	2.00	Satker	268,902,000	5,675,000	2.11 %	0.00	0.00 %	1.06 %
10	Pengelolaan Laporan Keuangan DIPA 03	24.00	SATKER	3,600,000	1,500,000	41.67 %	10.00	41.67 %	41.67 %

Tahun Anggaran :2018

Periode : Triwulan III

Perhitungan : kumulatif

No	Kode & Nama (Kegiatan, Output, SubOutput, Komponen)	Vol	Satuan	Alokasi Anggaran	Realisasi				
					Anggaran		Fisik		Kinerja Total
					Realisasi	Kinerja	Realisasi	Kinerja	
1	Pencatatan Register Perkara Banding	326.00	0	198,371,000	124,579,050	62.80 %	253.00	77.61 %	70.20 %
2	Minutasi	326.00	PKR	830,000	0	0.00 %	243.00	74.54 %	37.27 %
3	Pengiriman Salinan Putusan Kepada Pengadilan Pengaju	326.00	Perkara	16,300,000	11,246,000	68.99 %	1,488.00	456.44 %	262.72 %
4	Pengiriman Surat Penahanan	326.00	OK	46,080,000	23,885,000	51.83 %	222.00	68.10 %	59.97 %
5	Pencatatan Register Perkara Banding	20.00	PKR	20,033,000	10,985,750	54.84 %	13.00	65.00 %	59.92 %
6	Minutasi	20.00	Perkara	50,000	0	0.00 %	0.00	0.00 %	0.00 %
7	Pengiriman salinan putusan kepada Pengadilan pengaju	20.00	Perkara	5,047,000	2,191,500	43.42 %	12.00	60.00 %	51.71 %
8	Pengiriman surat penahanan	20.00	Perkara	200,000	0	0.00 %	15.00	75.00 %	37.50 %
9	Pembinaan/Pengawasan Pelayanan Publik oleh Tingkat Banding ke Tingkat Pertama	2.00	Satker	268,902,000	5,675,000	2.11 %	0.00	0.00 %	1.06 %
10	Pengelolaan Laporan Keuangan DIPA 03	24.00	SATKER	3,600,000	2,400,000	66.67 %	16.00	66.67 %	66.67 %

Tahun

Anggaran : 2018

Periode : Triwulan IV **Perhitungan** : kumulatif

No	Kode & Nama (Kegiatan, Output, SubOutput, Komponen)	Vol	Satuan	Alokasi Anggaran	Realisasi				
					Anggaran		Fisik		Kinerja Total
					Realisasi	Kinerja	Realisasi	Kinerja	
1	Pencatatan Register Perkara Banding	326.00	0	198,371,000	198,358,160	99.99 %	326.00	100.00 %	100.00 %
2	Minutasi	326.00	PKR	830,000	829,950	99.99 %	326.00	100.00 %	100.00 %
3	Pengiriman Salinan Putusan Kepada Pengadilan Pengaju	326.00	Perkara	16,300,000	16,269,000	99.81 %	1,517.00	465.34 %	282.57 %
4	Pengiriman Surat Penahanan	326.00	OK	46,080,000	46,080,000	100.00 %	326.00	100.00 %	100.00 %
5	Pencatatan Register Perkara Banding	20.00	PKR	20,033,000	20,032,485	100.00 %	20.00	100.00 %	100.00 %
6	Minutasi	20.00	Perkara	50,000	0	0.00 %	0.00	0.00 %	0.00 %
7	Pengiriman salinan putusan kepada Pengadilan pengaju	20.00	Perkara	5,047,000	4,475,900	88.68 %	20.00	100.00 %	94.34 %
8	Pengiriman surat penahanan	20.00	Perkara	200,000	0	0.00 %	20.00	100.00 %	50.00 %
9	Pembinaan/Pengawasan Pelayanan Publik oleh Tingkat Banding ke Tingkat Pertama	2.00	Satker	268,902,000	265,193,329	98.62 %	2.00	100.00 %	99.31 %
10	Pengelolaan Laporan Keuangan DIPA 03	24.00	SATKER	3,600,000	3,600,000	100.00 %	24.00	100.00 %	100.00 %

Tabel 37. Rekapitulasi Realisasi Anggaran DIPA 005.01.2.097467 dan DIPA 005.03.2.099062 Tahun Anggaran 2018

No	DIPA	PAGU	REALISASI	PERSENTASE
1	DIPA 005.01.2.097467 BUA	39.099.548.000	39.091.732.785	99,98%
2	DIPA 005.03.2.099062 BADILUM	559.413.000	554.838.824	99,18%
	Jumlah	39.658.961.000	39.646.571.609	99.97%

Capaian kinerja pada dasarnya diarahkan untuk mengukur tingkat keberhasilan visi yang telah ditetapkan dan dijabarkan dalam misi. Selanjutnya untuk mewujudkan visi tersebut ditetapkan tujuan, sasaran, kebijakan, program, dan kegiatannya. Oleh karena itu maka analisis capaian kinerja selanjutnya secara rinci dilaksanakan berdasarkan tingkat keberhasilan kegiatan-kegiatan dan/ atau program yang telah ditetapkan.

Berdasarkan evaluasi capaian kinerja Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Tahun 2018 yang diolah berdasarkan analisa pengukuran capaian indikator kinerja, bahwa pada Tahun 2018 semua Program dan Kegiatan telah memberikan Kontribusi kepada Visi dan Misi Pengadilan Tinggi DKI Jakarta.

Mengingat anggaran yang terbatas dan kurangnya sumberdaya manusia, maka kinerja Pengadilan Tinggi DKI Jakarta untuk Program Kerja Tahun 2018 dipandang baik walaupun belum sempurna. Usaha perbaikan terus dilakukan untuk meningkatkan pencapaian visi dan misinya, diantaranya menyusun perencanaan yang lebih matang dan terpadu mengalokasikan dana kepada kegiatan yang sangat prioritas dengan pengalokasian dana merujuk kepada rencana hasil yang akan didapat.

Peningkatan koordinasi dengan pihak-pihak terkait dan peningkatan profesionalisme kerja terus menerus dilakukan. Dengan adanya peningkatan kualitas SDM, sarana prasarana, dan dukungan dari semua pihak diharapkan kinerja Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dapat meningkat lebih sempurna lagi.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Pencapaian kinerja Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tahun 2018 merupakan pencapaian atas target kinerja tahun keempat dari Renstra Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tahun 2015-2019 yang di telah dilakukan reviu yang ketiga. Pengukuran tingkat capaian kinerja Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tahun 2018, dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan selama tahun 2018 dan pelaksanaan tugas pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sudah terlaksana dengan baik dan sebagaimana mestinya. Hal ini dapat dilihat dari berbagai aspek yang telah dilaksanakan berkaitan dengan pengelolaan administrasi perkara, administrasi umum, dan dalam hal pembinaan dan pengawasan.

Capaian kinerja pada tahun 2018 secara keseluruhan tingkat capaian kinerja Pengadilan Tinggi DKI Jakarta adalah sebesar **97,27%**. Capaian kinerja Tahun 2018 ini mengalami kenaikan kinerja sebesar **8.91%** dari capaian kinerja tahun 2017. Hal ini dikarenakan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta telah melakukan monitoring dan evaluasi terhadap capaian kinerja Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang menghasilkan perubahan terhadap target pada:

1. Persentase penurunan sisa perkara.
2. Persentase Perkara yang tidak mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali (PK).

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta juga merubah indikator kinerja pada sasaran strategis Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia menjadi Persentase Peningkatan Produktifitas Kinerja Sumber Daya Manusia (SKP Dan Penilaian Prestasi Kerja).

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta berupaya meningkatkan pengembangan teknologi informasi untuk mengimplementasikan

keterbukaan informasi publik di Pengadilan. Secara bertahap informasi yang disajikan kepada masyarakat semakin lengkap mencakup putusan pengadilan. Keterbukaan informasi pengadilan ini bertujuan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas publik lembaga peradilan.

Untuk mengatasi kendala-kendala dalam melaksanakan tugas dan menunjang peningkatan kinerja di Pengadilan Tinggi DKI Jakarta maka diperlukan :

1. Penambahan Sumber Daya Manusia yang ahli dan sesuai dengan kompetensi dalam nomenklatur jabatan sesuai dengan Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 801/SEK/Kp.I/SK/XII/2018 tentang Penetapan Nomenklatur Jabatan Pelaksana Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan di Bawahnya.
2. Penambahan alokasi anggaran untuk belanja modal dalam upaya pemenuhan standarisasi kebutuhan sarana dan prasarana aparatur peradilan.

Laporan Kinerja Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tahun 2018 merupakan gambaran capaian kinerja yang akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan, sekaligus sebagai tolok ukur dalam menjalankan tugas dan fungsi. Secara umum hasil capaian kinerja Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tahun 2018 telah dapat memenuhi target sesuai rencana kinerja yang telah direviu.

Keberhasilan maupun kendala atau hambatan dalam pencapaian kinerja di Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada tahun 2018 dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Keberhasilan

Keberhasilan atas pencapaian target dari rencana kinerja yang ditetapkan adalah tidak lepas dari peran serta semua pihak yang terlibat di dalamnya. Keberhasilan tersebut merupakan cerminan dari berjalannya sistem kerja yang berdasarkan Sistem Manajemen Mutu

yang didukung oleh suasana kerja yang dinamis dan bersifat kekeluargaan. Pencapaian kinerja di Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada tahun 2018 telah memenuhi target dengan uraian sebagai berikut :

- Persentase sisa perkara yang diselesaikan
- Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu
- Persentase penurunan sisa perkara
- Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi dan Peninjauan Kembali
- Index responden Pengadilan Tingkat Pertama yang puas terhadap layanan Pengadilan Tinggi
- Presentase Penilaian Prestasi Kinerja Pegawai (SKP dan Penilaian Prestasi Kerja)

2. Ketidak berhasilan

Ketidak berhasilan dalam pencapaian target yang telah ditetapkan terdapat dalam 3 (empat) indikator sasaran kinerja yakni :

- Persentase salinan putusan yang dikirim ke Pengadilan Pengaju Tepat Waktu.
- Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 (satu) hari setelah diputus
- Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti.

3. Kendala atau Hambatan

Dalam pelaksanaan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan oleh Pengadilan Tinggi DKI Jakarta ditemukan kendala atau hambatan yang dapat menghambat proses pelaksanaannya. Dalam indikator Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 (satu) hari setelah diputus hal ini belum dapat terlaksana dengan baik karena unsur kehati-hatian. Dalam Standar Operasional Prosedur yang ada di Kepaniteraan Tipikor bahwa setelah proses putusan dan minutasi berkas akan

dilakukan pemeriksaan ulang untuk mengantisipasi kesalahan pengetikan dalam putusan tersebut.

4. Langkah Strategis Tahun 2019

Pada tahun 2019 Pengadilan Tinggi DKI Jakarta akan menempuh langkah strategis untuk meningkatkan kinerja Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dengan cara sebagai berikut:

- a. Meningkatkan realisasi dan capaian terhadap indikator kinerja yang masih mengalami kegagalan memenuhi target yang telah ditetapkan;
- b. Akan melakukan monitoring dan evaluasi terhadap prosedur yang dianggap kurang mendukung terhadap terlaksananya efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara;

Akan melakukan pemantauan dan evaluasi secara periodik terhadap target, realisasi dan capaian sasaran strategis yang telah ditetapkan.

LAMPIRAN

- Perjanjian Kinerja (PK) Satker
- Rencana Kinerja Tahunan (RKT) yang dilaporkan dan rencana kinerja tahun berikutnya
- Reviu Matrik Rencana Strategis Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Tahun 2015-2019
- Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tentang Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Tahun 2016.
- Pemantauan Perkara Per Triwulan Tahun 2018

PKT 2018

**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
PENGADILAN TINGGI DKI JAKARTA**



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Dr. H. MUH. DAMING SUNUSI, SH., M.HUM**
Jabatan : Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta
Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

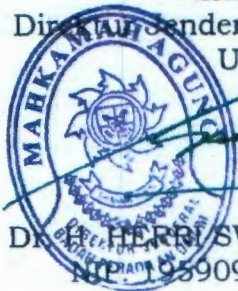
Nama : **Dr. H. HERRI SWANTORO, SH., MH**
Jabatan : Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum
Selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang dianggap perlu dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 2 Januari 2018

Pihak Kedua
Direktur Jenderal Badan Peradilan
Umum



Dr. H. HERRI SWANTORO, SH., MH
NIP. 195909041984031004

Pihak Pertama
Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta

Dr. H. MUH. DAMING SUNUSI, SH., M.HUM
NIP. 195206011978021001

NO.	SASARAN	INDIKATOR	TARGET
1	2	3	4
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a.	Persentase sisa perkara yang diselesaikan 1. Perkara Perdata 100% 2. Perkara Pidana 100% 3. Perkara Tipikor 100%
		b.	Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu 1. Perkara Perdata 93% 2. Perkara Pidana 94% 3. Perkara Tipikor 95%
		c.	Persentase penurunan sisa perkara 1. Perkara Perdata 15% 2. Perkara Pidana 47% 3. Perkara Tipikor 50%
		d.	Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum : • Kasasi 1. Perkara Perdata 39% 2. Perkara Pidana 36% 3. Perkara Tipikor 35% • Peninjauan Kembali (PK) 1. Perkara Perdata 66% 2. Perkara Pidana 82% 3. Perkara Tipikor 90%
		e.	Index responden Pengadilan Tingkat Pertama yang puas terhadap layanan Pengadilan Tinggi 75 (IKM)
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a.	Persentase salinan putusan yang dikirim ke Pengadilan Pengaju Tepat Waktu. 1. Perkara Perdata 100% 2. Perkara Pidana 100% 3. Perkara Tipikor 100%
		b.	Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara <i>online</i> dalam waktu 1 (satu) hari setelah diputus

		• Perkara Tipikor	100%
3.	Peningkatan kualitas pengawasan	Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	100%
4.	Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia	Persentase Hakim yang lulus eksaminasi Hakim Tinggi dalam rangka promosi jabatan	100%

No.	Program	Anggaran
1.	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum 03	Rp. 293.536.000,- (Dua ratus sembilan puluh tiga juta lima ratus tiga puluh enam ribu rupiah)
2.	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	Rp. 33.742.991.000,- (Tiga puluh tiga milyar tujuh ratus empat puluh dua juta sembilan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)
3.	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Rp. 574.000.000,- (Lima ratus tujuh puluh empat juta rupiah)

Jakarta, 2 Januari 2018

Pihak Kedua
 Dirjen Jenderal Badan Peradilan
 Umum



Dr. H. HERRI SWANTORO, SH., MH
 NIP. 195909041984031004

Pihak Pertama
 Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta

Dr. H. MUH. DAMING SUNUSI, SH., M.HUM
 NIP. 195206011978021001

RKT 2018

RENCANA KINERJA TAHUNAN

Unit Kerja : Pengadilan Tinggi DKI Jakarta
 Tahun Anggaran : 2018

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	ANGGARAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	
1. Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	a	Persentase sisa perkara yang diselesaikan 1. Perkara Perdata 2. Perkara Pidana 3. Perkara Tipikor		Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung (DIPA 01)	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi;	Penyelenggaraan Layanan Dukungan Manajemen Satker Daerah	12 Layan	Rp. 29.875.000
	b	Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu 1. Perkara Perdata 2. Perkara Pidana 3. Perkara Tipikor		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung (DIPA 01)	Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung RI;	Penyelenggaraan Layanan Perkarantoran;	12 Layan	Rp. 30.713.990.000
				Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum (DIPA 03)	Peningkatan Manajemen Peradilan umum;	Penyelenggaraan Layanan Internal	12 Layan	Rp. 2.877.831.000
c	Persentase penurunan sisa perkara 1. Perkara Perdata	15%			Perkara Peradilan Umum yang diselesaikan di tingkat pertama dan	346 Perkara	Rp. 275.016.000	

		2. Perkara Pidana 3. Perkara Tipikor	147% 50%			Banding yang tepat waktu.		
	d	Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum :						
		<ul style="list-style-type: none"> • Kasasi <ul style="list-style-type: none"> 1. Perkara Perdata 39% 2. Perkara Pidana 36% 3. Perkara Tipikor 35% • Peninjauan Kembali (PK) <ul style="list-style-type: none"> 1. Perkara Perdata 66% 2. Perkara Pidana 82% 3. Perkara Tipikor 90% 						
	e	Index responden Pengadilan Tingkat Pertama yang puas terhadap layanan Pengadilan Tinggi	75 (IKM)	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung (DIPA 01)	Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung RI;	Penyelenggaraan Layanan Internal	4 Layanan	Rp. 124.000.000
2.Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a.	Persentase salinan putusan yang dikirim ke Pengadilan Pengaju Tepat Waktu. <ul style="list-style-type: none"> 1. Perkara Perdata 100% 2. Perkara Pidana 100% 3. Perkara Tipikor 100% 		Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum (DIPA 03)	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Perkara Peradilan Umum yang Diselesaikan di Tingkat Pertama dan Banding yang Tepat Waktu.	346 Perkara	Rp. 18.520.000

	b.	Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara <i>online</i> dalam waktu 1 (satu) hari setelah diputus		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana (DIPA 01)	Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung	Terselenggara nya Layanan Internal	1 Layanan	Rp. 450.000.000
		1. Perkara Perdata 2. Perkara Pidana 3. Perkara Tipikor	100% 100% 100%					
3.Peningkatan kualitas pengawasan		Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	100%	Program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Mahkamah Agung (DIPA 01)	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan	Terselenggara nya Koordinasi/Konsultasi/Pembinaan/ Pengawasan dan Sosialisasi		Rp. 121.295.000
4.Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia		Persentase Hakim yang lulus eksaminasi Hakim Tinggi dalam rangka promosi jabatan	100%					



 Jakarta, 2 November 2017
Ketua,

Dr. H. Muh Daming Sunusi, SH., M.Hum.
 NIP. 19520601 197802 1 001

REVIU RKT 2018

22 November 2018

RENCANA KINERJA TAHUNAN

Unit Kerja : Pengadilan Tinggi DKI Jakarta
 Tahun Anggaran : 2018

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	ANGGARAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	
1. Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	a	Persentase sisa perkara yang diselesaikan 1. Perkara Perdata 2. Perkara Pidana 3. Perkara Tipikor		Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung (DIPA 01)	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi;	Penyelenggaraan Layanan Dukungan Manajemen Satker Daerah	12 Layan an	Rp. 8.876.560.000 Rp. 717.034.000 Rp. 93.235.500
	b	Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu 1. Perkara Perdata 2. Perkara Pidana 3. Perkara Tipikor	94% 95% 95%	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung (DIPA 01)	Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung RI;	Penyelenggaraan Layanan Perkarantoran; Penyelenggaraan Layanan Internal	4 layana n 347 perkara	Rp. 8.876.560.000 Rp. 717.034.000 Rp. 93.235.500
	c	Persentase penurunan sisa perkara 1. Perkara Perdata 2. Perkara Pidana 3. Perkara Tipikor	-10% -90% 30%	Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum (DIPA 03)	Peningkatan Manajemen Peradilan umum;	Perkara Peradilan Umum yang diselesaikan di tingkat pertama dan Banding yang tepat waktu.		Rp. 8.876.560.000 Rp. 717.034.000 Rp. 93.235.500
	d	Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum :						

		<ul style="list-style-type: none"> • Kasasi 1. Perkara Perdata 2. Perkara Pidana 3. Perkara Tipikor 	<p>80%</p> <p>70%</p> <p>60%</p>					<p>Rp. 8.876.560.000</p> <p>Rp. 717.034.000</p> <p>Rp. 93.235.500</p>
		<ul style="list-style-type: none"> • Peninjauan Kembali (PK) 1. Perkara Perdata 2. Perkara Pidana 3. Perkara Tipikor 	<p>95%</p> <p>95%</p> <p>95%</p>					
	e	Index responden Pengadilan Tingkat Pertama yang puas terhadap layanan Pengadilan Tinggi	75 (IKM)	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung (DIPA 01)	Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung RI;	Penyelenggaraan Layanan Internal	4 Layanan	Rp. 93.235.500
2.Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a.	Persentase salinan putusan yang dikirim ke Pengadilan Pengaju Tepat Waktu. <ul style="list-style-type: none"> 1. Perkara Perdata 2. Perkara Pidana 3. Perkara Tipikor 	<p>100%</p> <p>100%</p> <p>100%</p>	Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum (DIPA 03)	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Perkara Peradilan Umum yang Diselesaikan di Tingkat Pertama dan Banding yang Tepat Waktu.	346 Perkara	Rp. 93.235.500
	b.	Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara <i>online</i> dalam waktu 1 (satu) hari setelah diputus <ul style="list-style-type: none"> 1. Perkara Tipikor 	100%	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana (DIPA 01)	Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung	Terselenggaranya Layanan Internal	1 Layanan	Rp. 574.000.000

3.Peningkatan kualitas pengawasan	Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	100%	Program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan	Terselenggaranya Koordinasi/Konsultasi/Pembinaan/Pengawasan dan Sosialisasi	12 layanan	Rp. 75.585.000
4.Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia	Persentase Peningkatan Produktifitas Kinerja SDM (SKP dan Penilaian Prestasi Kerja)	100%	Mahkamah Agung (DIPA 01)		Terselenggaranya Koordinasi/Konsultasi/Pembinaan/Pengawasan dan Sosialisasi		Rp. 75.585.000

Jakarta, 22 November 2018

Ketua,

Dr. H. Muh. Daming Sunusi, SH., M.Hum.

NIP. 19520601 197802 1 001

RKT 2019

RENCANA KINERJA TAHUNAN

Unit Kerja : Pengadilan Tinggi DKI Jakarta
 Tahun Anggaran : 2019

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	ANGGARAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	
1. Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	a	Persentase sisa perkara yang diselesaikan 1. Perkara Perdata 2. Perkara Pidana 3. Perkara Tipikor		Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung (DIPA 01)	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi;	Penyelenggaraan Layanan Dukungan Manajemen Satker Daerah	1 Layan an	Rp. 7.511.561.250 Rp. 742.457.750 Rp. 95.700.000
	b	Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu 1. Perkara Perdata 2. Perkara Pidana 3. Perkara Tipikor	94% 95% 95%	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung (DIPA 01)	Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung RI;	Penyelenggaraan Layanan Perkarantoran; Penyelenggaraan Layanan Internal	1 laya n an	Rp. 7.511.561.250 Rp. 742.457.750 Rp. 95.700.000
	c	Persentase penurunan sisa perkara 1. Perkara Perdata 2. Perkara Pidana 3. Perkara Tipikor	10% 10% -75%	Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum (DIPA 03)	Peningkatan Manajemen Peradilan umum;	Perkara Peradilan Umum yang diselesaikan di tingkat pertama dan Banding yang tepat waktu.	700 perkara	Rp. 7.511.561.250 Rp. 742.457.750 Rp. 95.700.000
	d	Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum :						

		<ul style="list-style-type: none"> • Kasasi <ol style="list-style-type: none"> 1. Perkara Perdata 80% 2. Perkara Pidana 70% 3. Perkara Tipikor 60% • Peninjauan Kembali (PK) <ol style="list-style-type: none"> 1. Perkara Perdata 95% 2. Perkara Pidana 95% 3. Perkara Tipikor 95% 						Rp. 7.511.561.250 Rp. 742.457.750 Rp. 95.700.000
	e	Index responden Pengadilan Tingkat Pertama yang puas terhadap layanan Pengadilan Tinggi	75 (IKM)	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung (DIPA 01)	Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung RI;	Penyelenggaraan Layanan Internal	1 Layanan	Rp. 95.700.000
2.Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a.	Persentase salinan putusan yang dikirim ke Pengadilan Pengaju Tepat Waktu. <ol style="list-style-type: none"> 1. Perkara Perdata 100% 2. Perkara Pidana 100% 3. Perkara Tipikor 100% 		Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum (DIPA 03)	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Perkara Peradilan Umum yang Diselesaikan di Tingkat Pertama dan Banding yang Tepat Waktu.	700 Perkara	Rp. 95.700.000
	b.	Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara <i>online</i> dalam waktu 1 (satu) hari setelah diputus <ol style="list-style-type: none"> 1. Perkara Tipikor 100% 		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana (DIPA 01)	Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung	Terselenggara nya Layanan Internal	1 Layanan	Rp. 337.500.000

3.Peningkatan kualitas pengawasan	Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	100%	Program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan	Terselenggaranya Koordinasi/Konsultasi/Pembinaan/Pengawasan dan Sosialisasi	1 layanan	Rp. 56.085.000
4.Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia	Persentase Peningkatan Produktifitas Kinerja SDM (SKP dan Penilaian Prestasi Kerja)	100%	Mahkamah Agung (DIPA 01)		Terselenggaranya Koordinasi/Konsultasi/Pembinaan/Pengawasan dan Sosialisasi	1 layanan	Rp. 56.085.000

Jakarta, 2 Januari 2019
Ketua,

Dr. H. Muh. Daming Sunusi, SH., M.Hum.
NIP. 19520601 197802 1 001



KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI DKI JAKARTA
NOMOR : W10.U/ 139 /KP.01.1/12/2018

TENTANG

TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) 2018
DAN DOKUMEN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019
SERTA RENCANA KINERJA TAHUN 2020
PADA PENGADILAN TINGGI DKI JAKARTA

KETUA PENGADILAN TINGGI DKI JAKARTA

- Membaca** : Surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor : 1385/SEK/OT.01.2/11/2017 tanggal 12 Nopember 2018 tentang Penyampaian LKjIP tahun 2018 dan Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2019.
- Menimbang** : 1. Bahwa untuk kelancaran Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2018, Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2019, Rencana Kinerja Tahun 2020 pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta perlu dibentuk Tim.
2. Bahwa mereka yang namanya tercantum dalam daftar lampiran surat keputusan ini dipandang cakap dan mampu melaksanakan tugas tersebut.
- Mengingat** : 1. Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
2. Diktum ketiga Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Penyusunan Dokumen Penetapan Kinerja mulai dari Pengadilan Negeri (Tingkat Pertama), ke atas secara berjenjang dengan berdasarkan Indikator Kinerja Utama masing-masing.
3. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : PER/09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama.
4. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (MENPAN) Nomor : SE/31/M.PAN/12/2014 tentang Penetapan Kinerja serta sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi.
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor : 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

MEMUTUSKAN :

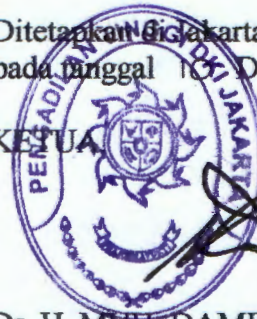
- Menetapkan** KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI DKI JAKARTA TENTANG TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) 2018 DAN DOKUMEN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019 SERTA RENCANA KINERJA TAHUN 2020 PADA PENGADILAN TINGGI DKI JAKARTA.
- Kesatu** : Membentuk Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) 2018 dan Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2019 serta Rencana Kinerja Tahun 2020 pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

Kedua.....


- Kedua** : Agar melaksanakan tugas penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) 2018 dan Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2019 serta Rencana Kinerja Tahun 2020 pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, paling lambat sudah melaporkan hasilnya akhir Pebruari 2019.
- Ketiga** : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.
- Keempat** : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 10 Desember 2018

KESUA



Dr. H. MUH DAMING SUNUSI, SH.,M.Hum
NIP. 19520601 197802 1 001

Handwritten mark

Lampiran Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta

Nomor : W10-U/139/KP.01/12/2018

Tanggal : 10 Desember 2018

Tentang :

**TIM PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) 2018 DAN
DOKUMEN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019 SERTA RENCANA KINERJA TAHUN 2020
PADA PENGADILAN TINGGI DKI JAKARTA**

No.	NAMA / NIP	JABATAN	JABATAN DALAM SURAT KEPUTUSAN
1.	2.	3.	4.
1.	Dr. H. Muh. Daming Sunusi, SH., M.Hum NIP. 19520601 197802 1 001	Ketua	Pembina
2.	Ester Sireghar, SH., MH NIP. 19580420 198303 2 001	Hakim Tinggi	Ketua Tim
3.	Dr. Hj. Heru Iriani, SH., M.Hum NIP. 19550801 198203 2 001	Hakim Tinggi	Wakil Ketua Tim
4.	Sudirman WP, SH., MH NIP. 19530805 198403 1 001	Hakim Tinggi	Anggota
5.	Imam Sungudi, SH NIP. 19530203 198403 1 001	Hakim Tinggi	Anggota
6.	Elang Prakoso Wibowo, SH., MH NIP. 19580524 198503 1 002	Hakim Tinggi	Anggota
7.	James Butar Butar, SH., M.Hum NIP. 19581115 198403 1 004	Hakim Tinggi	Anggota
8.	Hi. A. Sanwari HA, SH., MH NIP. 19551215 198403 1 001	Hakim Tinggi	Anggota
9.	Purnomo Rijadi, SH NIP. 19540528 198303 1 002	Hakim Tinggi	Anggota
10.	Johanes Suhadi, SH., MH NIP. 19530413 198503 1 001	Hakim Tinggi	Anggota
11.	Dr. H. Teuku Ilzanor, SH., SE., M.Hum NIP. 19570830 197903 1 003	Panitera	Anggota
12.	Drs. Nasrulloh, M.Si NIP. 19650613 198503 1 001	Sekretaris	Anggota
13.	Itjah Minantika, SE., SH., MH NIP. 19770530 200502 2 001	Kepala Bagian Kepegawaian dan Perencanaan	Koordinator Pengumpul Data LKjIP
14.	Suhardi, SH NIP. 19630821 198503 1 003	Kepala Bagian Umum dan Keuangan	Koordinator Pengumpul Data LKjIP
15.	H. Sobandi, SH., MH NIP. 19571117 198603 1 001	Panitera Muda Perdata	Anggota
16.	Jul Rizal, SH., MH NIP. 19610731 198303 1 004	Panitera Muda Pidana	Anggota
17.	H. Suparno, SH., MH NIP. 19600404 198012 1 001	Panitera Muda Hukum	Anggota
18.	Yulman SH., MH NIP. 19640207 199403 1 001	Panitera Muda Khusus Tipikor	Anggota
19.	Tri Sathono, SH NIP. 19661129 198603 1 001	Kepala Sub.Bagian Kepegawaian dan TI	Anggota
20.	Sabrina Napitupulu, SE., MH NIP. 19661012 200604 2 001	Kepala Sub.Bagian Keuangan dan Pelaporan	Anggota
21.	Hadiarti Trimulyami, S.Kom NIP. 19790701 200604 2 002	Kepala Sub.Bagian Perencanaan dan Program Anggaran	Pengumpul Data LKjIP RPA
22.	Amirnurillah, SH NIP. 19810725 200112 1 003	Kepala Sub. Bagian Tata Usaha dan Rumah Tangga	Pengumpul Data LKjIP TU & RT
23.	Syahrul Ramadhan, SH NIP. 19860523 201101 1 009	Staf Kepaniteraan Tipikor	Pendamping Kompilasi Data LKjIP PT
24.	Teguh Iman Sunaryo NIP. 19700803 199003 1 001	Staf Kepaniteraan Perdata	Pengumpul Data LKjIP Perdata
25.	Dwinanto, SE., SH NIP. 19810525 200904 1 001	Staf Sub.Bag Keuangan dan Pclaporan	Pengumpul Data LKjIP Keuangan
26.	Elmina Pratiwi, SH., MH NIP. 19861214 200604 2 001	Staf Kepaniteraan Tipikor	Pengumpul Data LKjIP Tipikor

1.	2.	3.	4.
27.	Destian Bimantoro, S. Kom NIP. 19851213 201101 1 007	Staf Kepaniteraan Hukum	Pendamping Kompilasi Data LkjiP PT
28.	Nurussobah, SH., MH Nip. 19760807 201101 2 005	Staf Kepaniteraan Hukum	Pengumpul Data LKjiP Hukum
29.	Wulandari Aprilita, SH NIP. 19860401 201101 2 023	Staf Sub.Bag.Kepeg. dan TI	Pengumpul Data LKjiP Kepegawaian
30.	Mirna Diniarti, A.Md NIP. 19860926 200912 2 005	Staf Sub.Bag.Kepeg. dan TI	Pendamping Kompilasi Data LKjiP
31.	Nur Sidik NIP. 19800519 200604 1 028	Staf Kepaniteraan Perdata	Pengumpul Data LKjiP Perdata
32.	Heru Caprina Permatasari, S.I.Kom NIP. 19850115 201503 2 001	Staf Kepaniteraan Pidana	Kompilasi Data LKjiP PT
33.	Tofas Heru Sesto NIP. 19801216 200604 1 001	Staf Kepaniteraan Pidana	Pengumpul Data LKjiP Pidana



 KETUA,
 Dr. H. MUJIB DAMING SUNUSI, SH., M.Hum
 NIP. 19520601 197802 1 001